

BAB 4

PEMBENTUKAN FKPM NAGORI SENIO

Pendekatan pemolisian komunitas didasari oleh asumsi yang terbukti bahwa polisi tidak secara efektif mengendalikan kejahatan atau menangani penyebab kejahatan sendirian. Apa yang diperlukan adalah dibangunnya suatu kemampuan bersama warga dan polisi untuk mencegah dan memerangi kejahatan. Oleh karena itu polisi harus merencanakan dan mengelola masalah pemolisian dengan menekankan pada kemitraan dengan masyarakat. Konsekuensi dari kedekatan antara polisi dengan masyarakatnya adalah meningkatnya kegiatan asosiasi pencegahan kejahatan oleh masyarakat (Parker, 1984:70). Asosiasi-asosiasi ini diorganisasikan sesuai dengan wilayah geografisnya atau menurut kepentingannya. Untuk dapat menampung aspirasi dari semua asosiasi ini maka dibentuklah forum kemitraan antara polisi dan warga. Oleh karena itu pemberdayaan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) diyakini sebagai salah satu mekanisme paling efektif untuk merencanakan dan memecahkan masalah keamanan dan ketertiban.

Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) dibentuk sebagai wadah konsultasi dan komunikasi antara polisi dan warga. Polisi dan warga bersama-sama mengidentifikasi masalah di lingkungannya, memahami kebutuhan warga masyarakat, menentukan prioritas penanganan, dan untuk mencari solusi penanganannya atau pemecahan masalah. Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) memungkinkan masyarakat dan polisinya bekerjasama dalam mengidentifikasi masalah keamanan dan ketertiban, memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi warga, menyesuaikan layanan polisi dengan kebutuhan masyarakat yang mereka layani dan mendorong terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman sebagai tempat tinggal dan bekerja. Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) dibentuk pada tingkat kecamatan, desa atau kelurahan.

Rencana pembentukan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dimulai sejak dikeluarkannya Program Lima Tahun (Prolita) Polmas Polda Sumatera Utara Tahun 2006-2010. Prolita ini disusun untuk memacu kinerja dan sebagai pedoman kerja bagi jajaran Polda Sumut dalam

mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat. Prolita ini berisi tentang pedoman penyelenggaraan Perpolisian Masyarakat mulai dari penyediaan sumber daya manusia, mengadakan sarana dan prasarana, pembuatan sistem dan metoda serta sosialisasi dan publikasi. Salah satu target kegiatan dalam Prolita tersebut adalah berdirinya Balai Kemitraan-Polisi Masyarakat (BKPM) dan terbentuknya pengurus Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan.

Prolita Polda Sumut Tahun 2006-2010 merupakan hasil penjabaran Perpolisian Masyarakat sesuai dengan kebijakan dan strategi Kapolri yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Mengantisipasi beberapa target sasaran yang harus dicapai sesuai dengan Prolita tersebut maka kemudian Kapolres Simalungun membuat surat kepada para Kapolsek jajaran Polres Simalungun untuk mulai mempersiapkan kesatuan masing-masing unruk membentuk Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM). Dengan Surat Kapolres Simalungun No.Pol.: B/1023/III/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Menyiapkan Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) maka diperintahkan kepada para Kapolsek jajaran Polres Simalungun untuk mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan pembentukan Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) di tiap-tiap Polsek.

Realisasi pelaksanaan Prolita Polmas Polda Sumut Tahun 2006-2010 tersebut maka Kapolda Sumut menetapkan hari dan waktu pencaanangan model Perpolisian Masyarakat bagi jajaran Polda Sumut. Dengan Surat Telegram Kapolda Sumut No.Pol.:ST/326/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pencaanangan Model Polmas Sejawaran Polda Sumut maka pencaanangan model Perpolisian Masyarakat di jajaran Polda Sumut ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2006. Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencaanangan ini adalah peresmian Balai Kemitraan-Polisi Masyarakat (BKPM) di seluruh jajaran Polda Sumut dalam hal ini tiap Polres masing-masing meresmikan 1 (satu) Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) dan sekaligus mengesahkan pengurus Forum Komunikasi Polisi-Masyarakat (FKPM).

Menindak lanjuti Surat Telegram Kapolda Sumut tersebut maka Kapolres Simalungun menunjuk Kapolsek Bangun sebagai pelaksana penancangan Polmas untuk jajaran Polres Simalungun. Kabag Binamitra Polres Simalungun menjelaskan bahwa ditetapkannya Polsek Bangun sebagai percontohan penancangan Polmas karena wilayah Polsek Bangun merupakan wilayah dengan angka kriminalitas tinggi. Dengan pertimbangan tersebut maka Polsek Bangun ditetapkan sebagai *pilot project* penancangan model Perpolisian Masyarakat untuk jajaran Polres Simalungun. Atas dasar tersebut maka Kapolsek Bangun dan jajarannya mulai mempersiapkan rencana kegiatan penancangan model pemolisian komunitas untuk wilayah Polres Simalungun.

Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2006 Wakapolres Simalungun meresmikan Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) Kecamatan Gunung Malela dan mengesahkan pengurus Forum Komunikasi Polisi-Masyarakat (FKPM). Acara peresmian dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun, pejabat Pemerintah Kecamatan Gunung Malela dan unsur masyarakat. Peserta yang hadir dalam peresmian tersebut antara lain Bupati Simalungun yang diwakili oleh Asisten I Pemkab Simalungun, Ketua DPRD Simalungun yang diwakili anggota Komisi I DPRD Simalungun, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Simalungun, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun, Dandim 0207/Simalungun yang diwakili Kasi Intel, para Camat dalam wilayah Polsek Bangun (Camat Siantar, Camat Gunung Malela dan Camat Gunung Maligas), para Pengulu Jajaran Kecamatan Gunung Malela, para Kapolsek Jajaran Polres Simalungun, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, LSM, Wartawan dan Pengusaha. Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) Kec.Gunung Malela terletak di Jalan Asahan Km.14 Senio. Peresmian BKPM Kec.Gunung Malela merupakan deklarasi Polres Simalungun bahwa Perpolisian Masyarakat dijadikan sebagai salah satu pedoman kerja Polres Simalungun dan jajarannya.

Dalam acara peresmian Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) Kec.Gunung Malela sekaligus juga diumumkan para pengurus Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) Kecamatan Gunung Malela. Karena lokasi Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) Kecamatan Gunung Malela berada di

Nagori Senio maka pada tahap awal ini pembentukan pengurus dilakukan untuk wilayah Nagori Senio. Dengan Surat Keputusan Kapolsek Bangun No.Pol.: Skep/06/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006 maka ditetapkanlah pengurus Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) Kecamatan Gunung Malela. Dalam perkembangannya setelah terbentuknya Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) di beberapa Nagori di wilayah hukum Polsek Bangun maka pengurus Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) Kecamatan Gunung Malela secara langsung menjadi pengurus Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio. FKPM yang telah terbentuk dalam jajaran Polsek Bangun sampai saat dilakukan penelitian ini adalah sebanyak 4 (empat) buah antara lain: FKPM Nagori Senio Kecamatan Gunung Malela, FKPM Nagori Dolok Hataran Kec.Siantar, FKPM Nagori Nusa Harapan Kecamatan Siantar, dan FKPM Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas.

Proses pembentukan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: (1) Tahap Persiapan Pembentukan dan (2) Tahap Pelaksanaan Pembentukan.

4.1. Tahap Persiapan Pembentukan

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Surat Telegram Kapolda Sumut No.Pol.:ST/326/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pencanaan Model Polmas Sejawaran Polda Sumut yang dilakukan secara serentak di jajaran Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2006 maka Kapolres Simalungun menetapkan dan menunjuk Kapolsek Bangun sebagai pelaksana perencanaan model Perpolisian Masyarakat di jajaran Polres Simalungun. Atas dasar tersebut kemudian Kapolsek Bangun mulai melakukan langkah-langkah persiapan. Persiapan-persiapan tersebut meliputi menentukan lokasi perencanaan model Perpolisian Masyarakat, mencari bangunan untuk kantor/sekretariat BKPM, mempersiapkan atau menunjuk warga yang akan duduk sebagai pengurus BKPM, mempersiapkan acara perencanaan model Perpolisian Masyarakat meliputi peresmian kantor/sekretariat BKPM dan pengesahan

pengurus BKPM. Kapolsek memulai persiapan dengan mengadakan rapat internal Polsek. Rapat persiapan peresmian BKPM dan pengurusnya diikuti para pejabat Polsek Bangun antara lain Kanit Reskrim, Kanit Patroli, Ka. Pos Lantas, para Babinkamtibmas dan Baur Pul Baket. Dalam mempersiapkan acara tersebut Kapolsek Bangun tidak membentuk tim secara khusus. Seluruh anggota Polsek dilibatkan dan diorganisir langsung oleh Kapolsek Bangun.

4.1.1. Menentukan Lokasi Acara Penganangan Polmas

Dalam rapat internal Polsek, Kapolsek Bangun menjelaskan kepada peserta rapat bahwa Polsek Bangun mendapat perintah dari Kapolres Simalungun sebagai penyelenggara Acara Penganangan Model Polmas jajaran Polres Simalungun. Penganangan Model Perpolisian Masyarakat tersebut akan diisi dengan kegiatan peresmian Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) dan simulasi pemecahan masalah yang diperankan oleh para pengurus Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) yang telah ditunjuk sekaligus pengesahan pengurus BKPM Kecamatan Gunung Malela. Dalam rapat Kapolsek Bangun menjelaskan bahwa waktu persiapan sangat terbatas yakni hanya 1 (satu) minggu. Oleh karena itu tidak ada waktu lagi untuk mengadakan koordinasi dengan kecamatan maupun perangkat nagori. Untuk mempermudah persiapan maka Kapolsek memutuskan bahwa kegiatan penganangan penerapan model Polmas dilaksanakan di kecamatan yang berdekatan dengan Mapolsek Bangun.

Dalam rapat persiapan Kapolsek Bangun langsung memutuskan lokasi penganangan Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM). Agar memudahkan proses persiapan maka lokasi penganangan ditetapkan lokasi yang tidak berjauhan dengan Mapolsek Bangun. Lokasi pelaksanaan diputuskan dilaksanakan di Kecamatan Gunung Malela. Sebagaimana diketahui bahwa Polsek Bangun meliputi tiga wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Siantar, Kecamatan Gunung Malela dan Kecamatan Gunung Maligas. Kapolsek Bangun menjelaskan:

“Pelaksanaan penganangan model Polmas kami laksanakan di Kecamatan Gunung Malela karena lokasinya yang paling dekat dengan Mapolsek diantara 3 (tiga) Kecamatan yang menjadi wilayah

hukum Polsek Bangun. Koordinasi pun saya rasakan lebih mudah dengan Camat Gunung Malela dibandingkan dengan Camat Siantar atau Camat Gunung Maligas. Respon warga Kecamatan Gunung Malela juga lebih positif kepada polisi dibandingkan dengan warga dari kecamatan lain. Mungkin karena lokasi Polsek yang berada di Kecamatan Gunung Malela sehingga secara tidak langsung layanan Polsek juga lebih dirasakan oleh warga Kecamatan Gunung Malela. Dengan pertimbangan tersebut maka kantor BKPM pertama kami bentuk untuk Kecamatan Gunung Malela”.

4.1.2. Kantor atau Sekretariat

Setelah diputuskan Kecamatan Gunung Malela sebagai lokasi penancangan maka rapat dilanjutkan untuk menentukan bangunan yang dapat dijadikan sebagai kantor atau sekretariat atau Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM). Kantor atau sekretariat BKPM merupakan tempat bagi anggota FKPM untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan lain. Kantor BKPM harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain: Tempat—harus nyaman, mudah dicapai, dekat dengan pemukiman warga dan memungkinkan bagi orang yang tidak mampu fisik seperti cacat dan orang tua, Transportasi—sarana transportasi menuju dan meninggalkan kantor BKPM harus mudah. Kegagalan meraih partisipasi warga sering terjadi karena masalah transportasi terutama bagi warga dengan penghasilan rendah dan manula yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk mendukung implementasi pemolisian komunitas (Trojanowicz dan Bucqueroux, 1998:60).

Anggota Babinkamtibmas menyarankan bangunan milik CV.Niaga yang terletak di Jl.Raya Siantar-Perdagangan Km.14 Senio sebagai Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM). Bangunan milik CV.Niaga tersebut sedang tidak digunakan oleh perusahaan dan dalam kondisi kosong. Sebelumnya bangunan tersebut digunakan oleh karyawan CV.Niaga sebagai tempat tinggal. CV.Niaga adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengilingan padi. Sejak CV.Niaga tidak beroperasi lagi maka

bangunan tersebut tidak ada yang menempati. Bangunan tersebut permanen dan kondisinya baik. Untuk dapat digunakan hanya membutuhkan sedikit perbaikan yakni pengecatan ulang, membersihkan rumput dan mengganti beberapa atap seng yang bocor.

Kanit Reskrim menyarankan untuk kantor BKPM menggunakan salah satu bangunan milik PTPN 3 Kebun Bangun yang lokasinya di Dusun 2 berdekatan dengan kantor Pangulu Nagori Senio. Bangunan tersebut bersebelahan dengan mess karyawan PTPN 3 Kebun Bangun. Lokasi bangunan milik PTPN 3 Kebun Bangun cukup strategis karena lokasinya berada di tengah pemukiman warga dan berdekatan dengan kantor Pangulu Nagori Senio. Bangunan tersebut semi permanen dan dindingnya terbuat dari papan. Untuk dapat menggunakan bangunan milik PTPN 3 Kebun Bangun, Polsek Bangun harus mengajukan permohonan izin menggunakan bangunan kepada pihak manajemen pusat yang berada di Medan.

Karena waktu yang terbatas dan mendesak Kapolsek Bangun memutuskan untuk menggunakan bangunan milik CV.Niaga sebagai kantor atau sekretariat BKPM Kecamatan Gunung Malela karena selain lokasi bangunan tersebut berdekatan Mapolsek Bangun dan di pinggir jalan juga lebih mudah mendapat izin penggunaannya. Kapolsek Bangun memerintahkan anggota Babinkamtibmas menghubungi pemilik CV.Niaga. Anggota Ba.Polmas menjelaskan:

“Setelah ada 2 (dua) pilihan alternatif sebagai kantor BKPM maka Kapolsek memutuskan menggunakan bangunan milik CV.Niaga. Soalnya bangunan milik PTPN 3 belum jelas karena masih harus mengajukan permohonan dulu. Sementara waktu sudah mendesak. Pak Tarman salah satu anggota FKPM juga dekat dengan pemilik CV.Niaga karena dia selama ini sebagai pengawas di perusahaan makanya kita yakin bisa menggunakan bangunan tersebut”.

4.1.3. Keanggotaan

Setelah kantor atau sekretariat BKPM ditentukan maka selanjutnya rapat mulai membahas masalah siapa yang akan dijadikan pengurus BKPM. Pengurus BKPM tersebut kemudian menjadi anggota FKPM Nagori Senio.

Pembentukan FKPM didahului konsultasi dengan berbagai kelompok warga yang ada di lingkungan tersebut. Konsultasi dilakukan untuk mengetahui bentuk dan komposisi dari sebuah FKPM yang akan dibentuk. Dengan bentuk dan komposisi yang disetujui oleh warga maka keberadaan FKPM akan lebih diterima oleh warga sehingga anggota FKPM dapat bekerja dengan lebih baik. Selain melibatkan warga, pembentukan FKPM juga melibatkan kelompok-kelompok atau instansi yang berpengaruh di sekitar lingkungan (Sutanto, 2006). Sub-sub kelompok yang ada di komunitas dilibatkan dalam pemilihan anggota FKPM. Anggota FKPM dipilih dari perwakilan warga yang dianggap memiliki komitmen terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungannya. Mekanisme pemilihan anggota FKPM dilaksanakan secara terbuka, bebas dan langsung. Warga yang dicalonkan menjadi pengurus FKPM merupakan hasil rekomendasi warga dan merupakan perwakilan semua kelompok warga yang ada di lingkungan tersebut. Dalam rencana penancangan model Perpolisian Masyarakat, Kapolsek Bangun tidak melalui tahap konsultasi dan penajakan terhadap kebutuhan warga. Dengan waktu yang terbatas tidak mungkin melakukan konsultasi dan penajakan yang melibatkan seluruh elemen yang ada di wilayah. Kapolsek Bangun langsung menetapkan warga yang telah dihubungi dan menyatakan bersedia menjadi pengurus FKPM. Anggota Ba.Polmas menerangkan:

”Persiapan peresmian BKPM mendadak, Pak. Kami hanya punya waktu satu minggu menyiapkan tempat dan mencari orang yang akan dijadikan pengurus. Semuanya bergerak cepat, makanya kami tidak mungkin lagi mengumpulkan warga untuk mendapatkan masukan dan lainnya. Pokoknya perintah Kapolsek harus siap”.

Anggota FKPM adalah warga yang memiliki komitmen pada masalah-masalah sosial yang dialami warga. Karena waktu yang terbatas maka penunjukan anggota FKPM tidak melalui pemilihan. Anggota Ba.Polmas menghubungi orang-orang yang menurutnya bisa diajak bekerja sama. Anggota Ba Polmas menerangkan:

”Persiapan kami sangat terbatas. Makanya saya menghubungi warga yang sudah saya kenal dan menurut saya warga tersebut selama ini banyak membantu polisi. Bapak Drs.Sutarman, Ir.Samsuheri, Darsono, Aladin, Suwarno dan Legirin adalah orang-orang yang selama ini banyak membantu saya dalam kegiatan saya sebagai anggota Babinkamtibmas, terus terang Pak, saya juga belum paham apa itu FKPM, bagaimana memilih orang-orang yang akan menjadi anggota FKPM dan apa tugasnya. Makanya orang yang saya tunjuk pun bukan melalui pemilihan. Saya carilah warga yang selama ini mau membantu. Itupun saya bersyukur kalilah mereka mau”.

Anggota Babinkamtibmas menghubungi warga yang selama ini dikenal dan dekat dengan polisi serta kemungkinan mau membantu rencana Polsek. Anggota Babinkamtibmas yang ditugaskan menghubungi warga adalah Aiptu Nasrul yang bersuku bangsa Jawa. Warga yang dihubungi adalah kelompok paguyuban Puja Kesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatera). Warga yang dimaksud adalah warga yang selama ini dinilai memiliki komitmen pada masalah-masalah warga dan banyak membantu tugas-tugas Polsek. Adapun profil dari masing-masing anggota FKPM yang dihubungi oleh anggota Babinkamtibmas adalah:

- (1) Ketua FKPM Nagori Senio, Sdr.Sutarman, mantan pejabat sementara Pangulu Nagori Senio, dinilai memiliki komitmen terhadap masalah warga karena dalam kehidupan sehari-hari ia sering selalu sebagai orang pertama yang menginformasikan masalah kecelakaan atau perkelahian atau kejahatan yang terjadi di Nagori Senio. Sdr.Sutarman selama ini aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan Polsek dan sering menolong korban kecelakaan termasuk mengamankan barang milik korban. Drs.Sutarman adalah seorang sarjana lulusan STPMD Yogyakarta tahun 1990. Riwayat pekerjaan yang pernah jalannya antara lain sebagai Honorer di Planologi Kehutanan, karyawan PT.JAS Taksi, karyawan PT.Bintang Tata Kayu

Perkasa, Pangulu Nagori Senio, karyawan PT.KAS dan terakhir sebagai pengawas di CV.Niaga.

- (2) Wakil Ketua FKPM Nagori Senio, Sdr.Darsono, lulusan SLTA tahun 1969, bekerja selama 29 tahun sebagai PNS di Dinas PU Kabupaten Simalungun dan pensiun tahun 2003, tokoh masyarakat Nagori Senio, dinilai memiliki komitmen terhadap masalah karena aktif memberi masukan kepada Polsek jika terjadi permasalahan yang menyangkut warga dan kerap membantu Polsek menenangkan warga. Sdr.Darsono juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti sebagai Penasehat Generasi Muda Puja Kesuma Nagori Senio dan pengurus Syarikat Tolong Menolong Kemalangan (TMK) Nagori Senio.
- (3) Sekretaris FKPM adalah Aiptu Nasrul, Ba.Polmas Polsek Bangun yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Babinkamtibmas Polsek Bangun. Mengawali karier sebagai polisi tahun 1986 sebagai lulusan dari SPN Sampali Medan. Riwayat pekerjaan yang telah dilaksanakannya selama menjadi polisi adalah Ba.Sat.Bimmas Polres Simalungun tahun 1986, Ba.Polsek Bangun tahun 1988, Ba.Pos Pol.Pantoan tahun 1990, Babinkamtibmas Polsek Dolok Panribuan tahun 1995 dan Ba.Polmas Polsek Bangun tahun 2002 sampai sekarang.
- (4) Bendahara FKPM Nagori Senio, Sdr.Aladin BSc, lulus sarjana tahun 1986, pekerjaan swasta di bidang konveksi, dinilai sebagai orang yang memiliki perhatian terhadap tugas-tugas Polsek karena sering membantu kegiatan Polsek. Apabila Polsek memiliki kegiatan keluar kota atau mengadakan rapat di Polres dengan melibatkan beberapa warga maka Sdr. Aladin kerap membantu Polsek dengan menyiapkan sarana transportasi.
- (5) Anggota FKPM, Ir.Samsuheri, tokoh pemuda Nagori Senio, lulus sarjana Pertanian USI tahun 1989, bekerja sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dinilai memiliki komitmen terhadap masalah yang terjadi di lingkungan warga karena

dalam kehidupan sehari-hari dia aktif membantu Polsek jika ada perkelahian yang melibatkan pemuda dan tidak jarang membantu polisi pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan.

- (6) Anggota FKPM, Sdr.Suwarno, Pangulu Nagori Senio, tokoh pemuda Nagori Senio, dinilai memiliki komitmen terhadap masalah warga karena posisi dan kedudukannya sebagai Pangulu Nagori Senio.
- (7) Anggota FKPM, Sdr.Legirin, warga Dusun 2 Nagori Senio yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pangkas. Sebagai tukang pangkas sebagian besar warga ia dikenal baik tidak saja oleh warga Nagori Senio saja tetapi juga dikenal oleh warga dari Nagori dan Kecamatan lain. Karena dikenal oleh warga maka Sdr.Legirin sering di undang dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Keikutsertaannya dalam kegiatan kemasyarakatan tersebut membuat Sdr.Legirin semakin dikenal oleh warga.

Adapun warga yang dihubungi oleh anggota Babinkamtibmas dan kemudian bersedia menjadi pengurus FKPM Nagori Senio dapat dilihat pada Tabel 4.1..

Tabel 4.1. : Daftar Anggota FKPM Nagori Senio Menurut Usia, Pekerjaan & Suku Bangsa

NO	NAMA	PEKERJAAN	USIA	SK BANGSA
1.	Drs.Sutarman	Wiraswasta	47 Th	Jawa
2.	Darsono	Pensiunan PNS	61 Th	Jawa
3.	Nasrul	Polri (Ba.Polmas)	44 Th	Jawa
4.	Aladin BSc	Wiraswasta	47 Th	Jawa
5.	Ir.Samsuheri	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	43 Th	Jawa
6.	Legirin	Wiraswasta	51 Th	Jawa
7.	Suwarno	Pangulu	33 Th	Jawa

Anggota Ba.Polmas melaporkan kepada Kapolsek Bangun bahwa tokoh paguyuban Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Senio telah dihubungi dan bersedia menunjuk beberapa orang anggotanya sebagai pengurus BKPM Kec.Gunung Malela. Anggota paguyuban Pujakesuma

tersebut merupakan perwakilan warga yang ditunjuk mewakili Polsek Bangun dalam mengikuti sosialisasi Perpolisian Masyarakat yang dilaksanakan Polres Simalungun. Dalam acara sosialisasi Perpolisian Masyarakat tersebut tiap-tiap Polsek mengirimkan perwakilan warga dari tiap-tiap kecamatan dan nagori yang ada di Kabupaten Simalungun. Polsek Bangun mengirim Sdr.Sutarman Cs dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Dalam sosialisasi tersebut kepada seluruh peserta ditekankan pentingnya partisipasi warga dalam setiap kegiatan pecegahan masyarakat. Kejahatan ada ditengah-tengah warga. Warga yang paling mengetahui tentang peristiwa kejahatan yang terjadi di tengah-tengah warga. Polisi membutuhkan partisipasi warga dalam mencegah kejahatan. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara polisi dan masyarakat dalam mencegah kejahatan, mengatasi ketidaktertiban dan menghilangkan perasaan takut pada kejahatan. Wujud kerjasama tersebut maka di tingkat kecamatan atau desa akan dibentuk FKPM. FKPM adalah lembaga atau tempat berdiskusi dan konsultasi antara warga dan polisi dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebelum masalah tersebut menjadi kejahatan.

Sesuai dengan Kep.Kapolri tentang model Polmas maka setelah anggota FKPM terpilih maka dalam waktu singkat harus diadakan pertemuan internal untuk menyusun kepengurusan FKPM. Kepengurusan dipilih dengan cara *voting* yang dilakukan secara internal oleh anggota FKPM. Kepengurusan FKPM terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Kepengurusan FKPM Nagori Senio diketahui sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolsek Bangun No.Pol.: Skep/06/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006. Dalam Skep. Tersebut ditetapkan Drs.Sutarman sebagai Ketua, Darsono sebagai Wakil, Aiptu Nasrul sebagai Sekretaris, Aladin Bsc sebagai Bendahara, Ir.Samsuheri, Legirin dan Suwarno masing-masing sebagai anggota. Adapun Struktur Organisasi FKPM Nagori Senio dapat dilihat pada Gambar 4.1. dibawah ini.



Gambar 4.1.: Struktur Organisasi FKPM Nagori Senio Kecamatan Gunung Malela.

Kepengurusan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio terdiri dari 7 (tujuh) orang yang langsung ditunjuk oleh Kapolsek Bangun. Seorang anggota FKPM menjelaskan:

“FKPM sekarang tidak berjalan semata-mata bukan karena tidak anggaran. Sebenarnya FKPM sendiri tidak solid, Pak. Kalau FKPM ini solid enggak ada anggaran pun kita mau jalan, namanya juga untuk kebaikan warga. Tapi di internal FKPM sendiri ada masalah. Susunan pengurus FKPM tidak melalui kesepakatan dengan anggota. Hanya orang-orang tertentu saja dengan Kapolsek yang menyusunnnya. Setelah terbentuk, Ketua yang sekarang enggak pernah memberitahu anggota kalau ada kegiatan. Dia jalan sendiri, nanti setelah urusan mau selesai baru kami dikasitahu.”

Setelah warga dari paguyuban Pujakesuma bersedia menjadi pengurus FKPM maka Ba.Polmas mengundang mereka untuk bertemu dengan Kapolsek Bangun. Pertemuan dilaksanakan di ruang pertemuan (aula) Polsek Bangun dan diikuti oleh semua pejabat Polsek Bangun. Dalam pertemuan tersebut Kapolsek Bangun menjelaskan kepada warga tentang rencana Polsek Bangun sebagai tuan rumah pencaangan model Perpolisian untuk jajaran Polres Simalungun. Kapolsek Bangun meminta kepada warga untuk berpartisipasi dan ikut mendukung rencana tersebut. Dalam

pertemuan tersebut Kapolsek Bangun juga menyampaikan kebutuhan lahan dan bangunan yang akan dijadikan kantor BKPM Kecamatan Gunung Malela.

Dalam pertemuan tersebut salah satu warga yakni Bapak Sutarman menawarkan salah satu bangunan rumah milik CV.Niaga sebagai kantor sementara BKPM Kecamatan Gunung Malela. Sdr.Sutarman pernah bekerja di perusahaan penggilingan padi tersebut sebagai pengawas. Sejak tahun 2002 perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi sehingga salah satu bangunan yang biasanya digunakan sebagai tempat tinggal karyawan sudah tidak digunakan lagi. Bangunan milik CV.Niaga tersebut terletak di Jl.Raya Siantar-Perdagangan Km.14 Senio. Seorang anggota FKPM Nagori Senio mengatakan bahwa:

“Awalnya pada waktu itu kami diberitahu anggota Polsek Pak Nasrul mengenai rencana Polsek. Kemudian Kapolsek memanggil kami ke Polsek dan menyampaikan bahwa Polsek Bangun ditunjuk oleh Kapolres sebagai Polsek percontohan dalam penyelenggaraan Polmas dan selanjutnya Kapolsek mengutarakan rencana Polsek untuk meresmikan BKPM. Kapolsek juga mengatakan kalau nantinya BKPM ini akan difungsikan sebagai tempat menyelesaikan masalah warga sebelum ditangani polisi dan balai ini akan dikelola oleh anggota masyarakat yang terdiri dari wakil warga yang berasal dari LSM, wartawan, dan lain-lain. Karena keperluannya mendesak maka Pak Sutarman (Ketua FKPM Nagori Senio) menawarkan sebuah bangunan milik CV.Niaga yang kebetulan sedang tidak digunakan. Kemudian rumah tersebut dijadikan sebagai kantor BKPM Kec.Gunung Malela.”.

Pembentukan FKPM memerlukan koordinasi dengan instansi pemerintah. Dukungan pemerintah diperlukan untuk mendukung sarana dan prasarana. Dalam persiapan pencanangan model Perpolisian Masyarakat Kapolsek Bangun tidak mengadakan koordinasi dengan Camat, Pangulu dan tokoh masyarakat setempat serta lembaga perwakilan desa. Karena waktu yang ada untuk mempersiapkan acara tersebut sangat terbatas maka

Kapolsek Bangun melakukan persiapan dengan mengandalkan sumber daya yang ada di Polsek. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Camat Gunung Malela menjelaskan:

“Saya mengetahui BKPM ketika diundang untuk hadir pada saat peresmian. FKPM pun saya ketahui setelah Kapolres Simalungun memberikan penjelasan pada saat peresmian tersebut. Kapolsek yang lama tidak melakukan koordinasi dengan Camat terlebih dahulu tentang rencana pembentukan BKPM sehingga para penghulu dan warga kurang merespon rencana atau program yang disampaikan oleh Kapolsek. Bapak bisa lihat BKPM yang sudah dibentuk, lokasinya saja jauh dari Kecamatan dan tempatnya tidak layak padahal namanya BKPM Kec.Gunung Malela. Seharusnya Camat Gunung Malela ikut bertanggung jawab”.

4.1.4. Sarana dan Prasarana

Setelah diperoleh kepastian bangunan milik VC.Niaga dapat digunakan sebagai kantor BKPM Kecamatan Gunung Malela maka Kapolsek Bangun dan jajaran mulai melakukan perbaikan pada bagian bangunan yang rusak. Rumput dan lalang yang mengelilingi bangunan dibersihkan. Atap seng yang bocor diganti dengan seng baru. Bangunan dicat ulang sesuai warna lama yakni putih kombinasi warna biru. Pada bagian depan dipasang plang nama bertuliskan “Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) Kecamatan Gunung Malela”. Pagar kawat yang tadinya mulai kendor kembali dikencangkan dan dicat warna putih. Ruangan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian ruangan terdiri dari Ruang Ketua FKPM, Ruang Rapat, dan Ruang Pemecahan Masalah.

Sarana dan prasarana yang ada di kantor atau sekretariat BKPM antara lain di Ruang Ketua FKPM diisi dengan 1 (satu) buah kursi dan 1 (satu) buah meja. Ruang rapat diisi dengan 2 (dua) buah meja dan 2 (dua) buah kursi panjang. Ruang Pemecahan Masalah diisi dengan 2 (dua) meja, 2 (dua) kursi panjang, dan 1 (satu) buah peta wilayah tanggung jawab BKPM Kecamatan Gunung Malela. Kursi dan meja dibuat secara swadaya oleh warga. Pengadaan bahan cat, perbaikan atap, dan membersihkan lingkungan

bangunan merupakan swadaya Polsek Bangun yang dikoordinir oleh Kapolsek Bangun. Dalam mempersiapkan bangunan BKPM Kecamatan Gunung Malela tidak ada anggaran khusus baik dari Polres Simalungun maupun dari pemerintah setempat dalam hal ini Kecamatan. Kapolsek Bangun memberdayakan personil Polsek Bangun dan warga sekitar dalam menyiapkan acara peresmian BKPM Kecamatan Gunung Malela. Anggota Ba.Polmas menerangkan:

“Persiapan peresmian BKPM Kecamatan Gunung Malela ini sepenuhnya dilakukan Polsek. Dana persiapan semuanya ditalangi oleh Kapolsek. Kami anggota Polsek yang sibuk memberesin bangunan BKPM. Habis gimana Pak, waktu sudah mepet kali makanya enggak sempat lagi minta bantuan kemana-mana. Kapolsek peninglah waktu itu.”

4.2. Tahap Pelaksanaan Pembentukan

Setelah bangunan BKPM Kecamatan Gunung Malela dan pengurusnya siap maka Polsek Bangun masuk pada tahap pelaksanaan pembentuka atau peresmian BKPM Kecamatan Gunung Malela dan pengesahan pengurus BKPM Kecamatan Gunung Malela yang nantinya menjadi anggota FKPM Nagori Senio. Sesuai dengan Surat Telegram Kapolda Sumut No.Pol.:ST/326/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pencanaan Model Perpolisian Masyarakat Sejawaran Polda Sumut maka pelaksanaan peresmian BKPM Kecamatan Gunung Malela dan pengesahan anggota FKPM Nagori Senio dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2006. Pada H-3 Kapolsek Bangun mengadakan rapat persiapan terakhir dengan tim termasuk calon pengurus BKPM Kecamatan Gunung Malela yang kemudian menjadi anggota FKPM Nagori Senio. Dalam rapat tersebut tim mempersiapkan undangan bagi tamu undangan yang akan diundang dalam acara peresmian, membuat susunan acara, menentukan petugas-petugas pelaksana acara peresmian dan melatih calon anggota FKPM dalam peragaan atau simulasi cara penanganan masalah oleh FKPM sesuai dengan konsep simulasi yang dikirimkan Polda Sumut melalui Telegram Kapolda Sumut No.Pol.:T/85/III/2006 tanggal 23 Maret 2006 tentang Kata Sambutan Kapolda Sumut dalam Acara Pencanaan Penerapan

Perpolisian Masyarakat Sejajaran Poldan Sumut dan Konsep Simulasi Kegiatan FKPM sebagai Acuan Simulasi Kegiatan FKPM.

Pelaksanaan peresmian BKPM Kecamatan Gunung Malela dan pengesahan anggota FKPM Nagori Senio dilaksanakan di halaman gedung BKPM Kecamatan Gunung Malela yang berlokasi di Jl.Raya Siantar Perdagangan Km.14 Senio. Tamu undangan yang hadir pada acara peresmian dan pengesahan tersebut antara lain Bupati Simalungun yang diwakili oleh Asisten I Pemkab Simalungun, Ketua DPRD Simalungun yang diwakili anggota Komisi I DPRD Simalungun, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Simalungun, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun, Dandim 0207/Simalungun yang diwakili Kasi Intel, para Camat dalam wilayah Polsek Bangun (Camat Siantar, Camat Gunung Malela dan Camat Gunung Maligas), para Pengulu Jajaran Kecamatan Gunung Malela, para Kapolsek Jajaran Polres Simalungun, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, LSM, Wartawan dan Pengusaha. Adapun tertib acara dalam acara peresmian gedung BKPM Kecamatan Gunung Malela dan pengesahan anggota FKPM Nagori Senio adalah sebagai berikut:

- (1) Kata Pengantar Oleh Protokol.
- (2) Kata Sambutan Kapolres Simalungun dan Pembacaan Amanat Kapolda Sumut Dalam Rangka Peresmian Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) Kecamatan Gunung Malela.
- (3) Pemukulan Gong Oleh Wakapolres Simalungun Sebagai Tanda Peresmian Kantor BKPM dan Pembukaan Kain Selubung Papan Nama Kantor BKPM Kec.Gunung Malela.
- (4) Kata Sambutan Ketua DPRD Simalungun.
- (5) Kata Sambutan Bupati Simalungun.
- (6) Pembacaan Doa.
- (7) Istirahat (menikmati hidangan dan hiburan)
- (8) Pelaksanaan Simulasi.
- (9) Penutup

Dalam acara peresmian kantor BKPM Gunung Malela dan pengesahan anggota FKPM Nagori Senio dibuat simulasi kegiatan FKPM dalam menangani

masalah. Kegiatan simulasi diperankan oleh anggota FKPM Nagori Senio. Dalam simulasi dibuat 2 (dua) skenario permasalahan yang ditangani oleh FKPM.

Skenario 1

Anggota FKPM Nagori Senio mengetahui, menerima informasi masalah dari polisi.

2 (dua) orang murid SDN Nagori Senio terlibat perkelahian yang menyebabkan siswa yang bernama AMIN mengalami luka pada bagian kepala karena dipukul dengan batu oleh siswa yang bernama ROJAK. Orang tua AMIN melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke Polsek Bangun.

Kapolsek Bangun menginformasikan kasus tersebut kepada Ba.Polmas. yang juga sebagai sekretaris FKPM Nagori Senio. Ba.Polmas memberitahukan masalah tersebut kepada anggota FKPM Nagori Senio yang merupakan perwakilan dari unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat dan LSM dan mengundang mereka untuk melakukan rapat untuk membahas permasalahan tersebut di BKPM Kec.Gunung Malela. Rapat yang dipimpin oleh Ketua FKPM Nagori Senio memutuskan untuk mengundang kedua orang tua siswa yang terlibat perkelahian termasuk ROJAK dan AMIN.

Dalam pertemuan selanjutnya yang dihadiri seluruh anggota FKPM Nagori Senio dan kedua orang tua siswa yang terlibat perkelahian diperoleh kesepakatan bahwa kedua orang tua siswa setuju masalah diselesaikan secara kekeluargaan dengan catatan pihak orang tua siswa ROJAK meminta maaf dan membiayai pengobatan sampai sembuh, meyakinkan orang tua ROJAK agar anaknya tidak mengulangi perbuatannya kepada siapapun, orang tua ROJAK mengawasi dan menasehati anaknya agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Hasil forum diserahkan anggota Ba.Polmas dan Ketua FKPM Nagori Senio kepada Kapolsek Bangun.

Kapolsek Bangun mengundang unsur Muspika Gunung Malela guna membicarakan hasil kesepakatan damai dalam forum. Muspika Gunung Malela setuju jika permasalahan tersebut tidak diproses berdasarkan hukum namun melalui perdamaian mengingat pelaku anak dibawah umur dan

dianggap cukup dilakukan pembinaan oleh anggota FKPM Nagori Senio dan orang tuanya sendiri.

Skenario 2

Anggota FKPM Nagori Senio menemukan masalah.

Pada suatu hari 5 (lima) orang pemuda Dusun 1 yang sedang mabuk menghadang seorang warga dusun 3. Pada saat kelima pemuda tersebut hendak mengeroyok kebetulan seorang tokoh pemuda Nagori Senio lewat dan menghentikan pertikaian tersebut.

Tokoh pemuda Nagori Senio menginformasikan masalah tersebut kepada Ba.Polmas. Ba.Polmas lalu mengundang seluruh anggota FKPM Nagori Senio mengadakan rapat keesokan harinya. Dalam rapat tersebut Tokoh Pemuda Nagori Senio menceritakan permasalahan dalam rapat forum. Dalam rapat tersebut diputuskan akan dilaksanakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat. Anggota FKPM Nagori Senio mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan.

Pertemuan dilaksanakan di kantor BKPM Kec.Gunung Malela. Pertemuan dihadiri oleh seluruh anggota FKPM Nagori Senio, Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 3, kelima pemuda warga Dusun 1 dan pemuda warga dusun 3. Pertemuan dipimpin oleh Ketua FKPM Nagori Senio. Dalam pertemuan dibahas permasalahan mengenai perkelahian yang melibatkan para pemuda tersebut. Setelah dilakukan diskusi maka diperoleh kesepakatan. Kelima pemuda warga Dusun 1 meminta maaf kepada pemuda Dusun 3 dan berjanji tidak mengulangi perbuatan. Hasil kesepakatan tersebut dibuat dalam surat perdamaian yang ditanda tangani oleh semua pihak yang hadir. Dengan kesepakatan tersebut maka masalah dianggap selesai dan tidak ada kekuatiran akan terjadi aksi saling balas. Hasil kesepakatan tersebut dilaporkan oleh Ba.Polmas dan Ketua FKPM Nagori Senio kepada Kapolsek Bangun.

Dari 2 (dua) skenario masalah yang disimulasikan dalam acara peresmian kantor BKPM Kecamatan Gunung Malela dan pengurus FKPM Nagori Senio diketahui bahwa masalah yang ditangani oleh anggota FKPM adalah masalah-masalah yang sifatnya ringan yakni konflik anak dan pemuda. Dari kedua simulasi

tersebut kemudian anggota FKPM Nagori Senio melihat bahwa permasalahan yang akan ditangani adalah masalah perkelahian dan konflik. Padahal masalah yang seharusnya ditangani oleh FKPM adalah masalah ketidaktertiban yang diyakini dekat dengan kejahatan. Oleh karena itu tugas anggota FKPM adalah untuk mengetahui sumber permasalahan. Seperti dalam skenario simulasi, maka hal utama yang perlu ditangani oleh anggota FKPM adalah penyebab terjadinya perkelahian atau konflik. Tujuannya agar potensi peristiwa serupa tidak terulang kembali. Masalah perkelahiannya sendiri diserahkan penanganannya kepada kepolisian. Kepolisian yang menentukan apakah masalah tersebut diproses secara hukum atau cukup dilakukan pembinaan.

Dari simulasi yang telah dilakukan anggota FKPM Nagori Senio menyimpulkan bahwa setiap kasus perkelahian atau konflik antar warga menjadi kewenangan anggota FKPM untuk menyelesaikannya. Anggota FKPM Nagori Senio merasa sebagai pihak yang lebih dahulu menangani sebelum ditangani oleh polisi. Akibatnya anggota FKPM Nagori Senio memposisikan diri sebagai lembaga *extra* di luar kepolisian yang berwenang menangani masalah perkelahian atau konflik warga. Anggota FKPM Nagori Senio mulai berperan seolah-olah sebagai sub sistem dari Polsek Bangun. Kabag Bina Mitra menjelaskan bahwa:

“Anggota FKPM sekarang ada yang salah kaprah. Mereka berubah menjadi makelar kasus dengan cara membuat perdamaian yang mereka buat sebagai dasar untuk meminta polisi agar menghentikan penyidikan atau mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Kalau ada warga yang ditahan karena perkelahian atau pencurian, anggota FKPM kemudian mendamaikannya kemudian menyerahkan surat perdamaian kepada polisi agar orang yang ditahan dapat ditanggguhkan penahanannya atau perkaranya dihentikan. Makanya sekarang kami sedang melakukan penataan ulang agar FKPM ini berperan sesuai dengan konsep Polmas.”

Informasi tentang perkelahian atau konflik dalam simulasi diketahui dari laporan atau pengaduan dari warga. Dari simulasi ini muncul pemahaman anggota FKPM mengenai identifikasi masalah adalah menunggu adanya orang yang melapor atau mengadu. Anggota FKPM Nagori Senio tidak melakukan upaya identifikasi masalah dengan cara kunjungan, survei atau mengadakan pertemuan

dengan warga. Anggota FKPM Nagori Senio duduk di kantor BKPM sambil menunggu orang yang akan melapor atau mengadu. Kantor BKPM menjadi kantor yang terbuka selama 24 jam. Padahal anggota FKPM Nagori Senio memiliki pekerjaan lain dan tidak mungkin bisa ada di kantor BKPM sepanjang hari.

Setelah adanya laporan maupun pengaduan dari warga kemudian anggota FKPM Nagori Senio mengadakan pertemuan untuk menemukan jalan keluar atau solusi. Sebenarnya pertemuan dengan warga disamping sebagai salah satu cara untuk mencari solusi atau pemecahan masalah adalah juga merupakan salah satu cara untuk menerima masukan dari warga secara langsung tentang permasalahan yang dirasakan warga di lingkungannya. Pertemuan dilakukan bukan setelah adanya laporan atau pengaduan. Pertemuan dapat dilakukan secara berkala dan terjadwal atau dilakukan secara insidental ketika warga merasa ada permasalahan yang perlu didiskusikan dan dicarikan cara penanganannya. Pertemuan dilakukan untuk mengetahui permasalahan sosial yang meresahkan warga agar dapat ditangani secara dini sehingga hal-hal yang meresahkan warga tidak terjadi.

Dalam simulasi pertemuan dilakukan di kantor BKPM dan dihadiri oleh pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya pemahaman anggota FKPM bahwa pertemuan dengan warga dilakukan setelah ada kejadian. Pertemuan tidak dilaksanakan secara berkala. Pertemuan dalam membahas masalah dilakukan di kantor BKPM. Padahal forum konsultasi, diskusi dan pemecahan masalah dapat dilakukan di mana saja. Pertemuan forum tidak harus dilakukan di kantor BKPM. Jika pertemuan harus dilakukan di kantor BKPM maka akan mengurangi minat warga untuk hadir. Warga menginginkan pertemuan dapat dilaksanakan dimana saja. Pertemuan dapat dilakukan di rumah warga, di rumah anggota FKPM, di rumah Pangulu, di Kantor Nagori bahkan di kedai kopi sepanjang warga menghendaki. Yang penting dalam forum diperoleh suatu kesepakatan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan.

Permasalahan yang ditangani oleh FKPM adalah dua kejadian atau lebih yang memiliki kesamaan dalam satu unsur atau lebih dapat menyebabkan terjadinya kejahatan, rasa takut dan ketidaktertiban dalam lingkungan warga. Suatu masalah berbeda dari satu kejadian tunggal yang terpisah. Kasus perkelahian dan konflik yang ditangani oleh forum dalam skenario simulasi

adalah kejadian tunggal yang belum tentu merupakan masalah bagi warga lainnya. Seharusnya kasus yang diselesaikan oleh FKPM adalah kasus perkelahian yang sifatnya berulang baik dari segi pelaku, lokasi, waktu maupun korban. Suatu kejadian yang dianggap sebagai masalah setelah memenuhi dua kriteria berikut:

- (1) Suatu masalah melibatkan sejumlah kejadian yang berulang atau berhubungan.
- (2) Masalah tersebut menjadi perhatian warga dan polisi.

Pencegahan kejahatan secara jelas merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian dan sebelum tindak kejahatan berkembang lebih jauh. Pencegahan kejahatan bertujuan agar tingkah laku kriminal tidak terjadi karena apabila tingkah laku kriminal dapat dicegah maka hukum telah ditegakkan. Dari kedua skenario yang ditunjukkan dalam simulasi pada saat peresmian BKPM Kecamatan Gunung Malela maka peran anggota FKPM adalah sebagai penengah atau juru damai antara warga yang bertikai. Peran tersebut dilakukan setelah muncul masalah atau kasus. Kegiatan pencegahan kejahatan yang dilakukan anggota FKPM terbatas pada mengendalikan suatu permasalahan agar tidak berkembang. Permasalahan pemukulan dan perselisihan kemudian didamaikan oleh anggota FKPM dalam pertemuan dengan harapan terwujud perdamaian dan masalah selesai dan tidak berkembang. Anggota FKPM tidak bekerja melakukan upaya pencegahan secara dini dengan melakukan observasi pada perkembangan situasi di lingkungan. Pencegahan kejahatan merupakan tujuan utama dari FKPM karena ukuran keberhasilan adalah pada tidak adanya peristiwa kejahatan bukan pada apa yang telah dilakukan atas suatu peristiwa kejahatan.

BAB 5

KEGIATAN ANGGOTA FKPM NAGORI SENIO

5.1. Mengidentifikasi Permasalahan Warga

FKPM dibentuk sebagai wadah komunikasi antara polisi dan warga masyarakat untuk memahami kebutuhan warga masyarakat berkenaan dengan masalah-masalah sosial. Pembentukan lembaga FKPM dilandasi atas adanya kesadaran antara polisi dan masyarakat bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban dituntut adanya kerjasama antara polisi dan warga. Dalam FKPM warga bersama polisi mengidentifikasi permasalahan yang ada di tengah-tengah warga, menentukan prioritas penanganan dan memecahkan masalah. Tujuan indentifikasi masalah oleh FKPM adalah agar dapat dilakukan analisa secara tepat (analisa demografis, analisa kriminalitas, analisa tingkat pengangguran, dan lain-lain) agar layanan kepolisian dapat disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan warga.

Identifikasi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat dilakukan dengan cara mengumpulkan masukan, informasi dan pendapat dari masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Kapolri No.Pol.: 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengumpulan Pendapat Masyarakat, kegiatan mengumpulkan pendapat masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa metode antara lain dengan orientasi (observasi), survei dan pengamatan berperan serta (pengamatan terlibat).

Metode orientasi (observasi) dilakukan dengan peninjauan terhadap individu atau perorangan maupun kelompok yang ada dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperoleh data awal tentang kondisi warga beserta lingkungannya. Dengan tersedianya profil masyarakat akan memudahkan menyusun rencana kegiatan dan menentukan prioritas kegiatan. Setiap individu atau kelompok mungkin memiliki persepsi dan keprihatinan yang berbeda mengenai keamanan. Mungkin juga individu dan kelompok memiliki pendapat yang berbeda terhadap kebutuhan atau masalah tertentu. Sehingga melalui kegiatan orientasi masyarakat dapat diidentifikasi menurut struktur yang telah ada.

Metode survei juga dapat dilakukan untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Metode ini dilakukan dengan pengisian angket atau kuesioner yang telah dipersiapkan. Kuesioner atau angket diisi oleh warga pada komunitas yang akan disurvei. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data secara kualitatif maupun kuantitatif. Namun survei seperti ini biasanya memakan waktu, biaya, serta cukup rumit. Oleh karena itu survei hanya bisa dilakukan jika cukup anggaran dan memiliki keahlian teknis. Perlu juga dicatat bahwa metode survei tidak banyak bermanfaat apabila dilakukan dalam masyarakat dengan tingkat buta huruf yang masih tinggi. Jika masyarakat atau komunitas yang akan disurvei tidak memenuhi syarat tersebut maka dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih informal seperti melakukan wawancara. Metode wawancara dapat dilakukan dengan teknik wawancara berstruktur maupun tidak berstruktur. Tujuan dilakukan survei adalah untuk memperoleh penilaian warga tentang pelaksanaan tugas pokok polisi, kinerja anggota FKPM untuk dapat digunakan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan. Metode ini juga dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang ada di tengah-tengah warga meliputi masalah kejahatan, ketidaktertiban dan rasa takut terhadap kejahatan.

Metode pengamatan berperan serta dilakukan dengan cara interaksi sosial. Interaksi tersebut secara sengaja dibangun sedemikian rupa agar memungkinkan diperoleh informasi yang ingin diketahui. Metode ini tujuannya adalah untuk memperjelas atau mengecek ulang data yang telah diperoleh. Dalam pengamatan berperan pengamat hendak memahami masalah menurut perspektif warga.

Anggota FKPM Nagori Senio mengidentifikasi permasalahan di tengah-tengah warga dengan cara menerima keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh warga. Keluhan atau pengaduan dari warga berkaitan dengan permasalahan yang mereka alami. Anggota FKPM Nagori Senio menerima keluhan atau pengaduan dari warga dalam pergaulan mereka sehari-hari. Warga yang melapor atau mengadu kepada anggota FKPM tidak terikat dengan birokrasi baku dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Anggota FKPM Nagori adalah warga Nagori Senio. Anggota FKPM Nagori tinggal dan menetap di Nagori Senio. Kabag Bina Mitra Polres Simalungun menerangkan:

”Anggota FKPM kan warga setempat dan mereka tinggal di lingkungan tersebut. Setiap hari mereka pasti berjumpa, berinteraksi dan berkomunikasi dengan warga setempat. Jadi tak perlu mereka harus melakukan kunjungan khusus karena setiap hari nya mereka jumpa. Dalam pergaulan sehari-hari semenjak mereka menjadi anggota FKPM, mereka memiliki kewajiban atau tugas tambahan untuk mendengarkan keluhan warga dan mengamati masalah warga. Apabila ada permasalahan maka anggota FKPM menangani permasalahan tersebut dengan mengadakan pertemuan. Selain dari pegaduan warga, masalah yang ditangani FKPM dapat juga berasal dari Polsek. Apabila ada warga yang melapor ke Polsek yang kemudian menurut Kapolsek dapat diselesaikan oleh FKPM maka masalah tersebut akan diinformasikan kepada anggota FKPM melalui Ba.Polmas agar dimusyawarahkan”.

Oleh karena itu warga yang ingin melaporkan permasalahan kepada anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio tidak perlu harus datang ke Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) tetapi dapat dilakukan dimana saja. Anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio merupakan warga Nagori Senio yang dianggap memiliki perhatian dan komitmen terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya. Anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio di tunjuk oleh Polsek atas dasar penilaian bahwa selama ini mereka dianggap memiliki komitmen dan perhatian terhadap masalah yang terjadi di Nagori Senio.

Selain itu identifikasi masalah yang dilakukan oleh FKPM Nagori Senio dilakukan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Polsek Bangun. Karena lembaga Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio merupakan lembaga baru maka masih banyak warga yang belum mengetahui lembaga tersebut. Akibatnya sebagian besar warga Nagori Senio cenderung melaporkan masalahnya ke Polsek Bangun. Permasalahan yang langsung dilaporkan warga ke Polsek Bangun akan diketahui anggota FKPM melalui Ba.Polmas. Permasalahan yang diinformasikan kepada anggota FKPM Nagori Senio adalah permasalahan yang oleh Polsek dianggap sebagai masalah/kasus ringan.

Oleh karena itu sumber informasi anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dalam mengidentifikasi permasalahan adalah warga dan polisi. Pengaduan atau keluhan yang di sampaikan warga dan informasi dari Polsek selanjutnya akan di teruskan kepada seluruh anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio. Laporan, pengaduan, keluhan dan informasi yang diterima kemudian dicatat oleh Anggota Ba.Polmas dalam agenda kegiatan anggota FKPM.

Untuk memperoleh masukan dari warga dan untuk mengetahui permasalahan yang ada di tengah-tengah warga anggota FKPM Nagori Senio tidak membuat program khusus seperti melakukan observasi, melaksanakan kunjungan ke rumah-rumah warga, melakukan wawancara atau melakukan survei. Anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio menunggu warga yang akan melapor atau mengadu. Anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio menerangkan bahwa tugas anggota FKPM adalah menyelesaikan masalah yang dilaporkan oleh warga sebelum ditangani oleh polisi. Tugas tersebut sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Kapolsek Bangun melalui Ba.Polmas maupun sosialisasi yang pernah dilakukan oleh Bag.Bina Mitra Polres Simalungun. Anggota FKPM Nagori Senio menerangkan:

”Kami anggota FKPM belum pernah mendapat pelatihan khusus sebagai anggota FKPM. Beberapa kali kami dipanggil ke Polsek atau ke Polres membicarakan masalah FKPM namun tidak ada petunjuk yang jelas mengenai tugas anggota FKPM. Terus terang Pak, kami hanya diberitahu bahwa FKPM membantu polisi menangani permasalahan warga sebelum ditangani polisi. Kalau ada masalah FKPM menangani lebih dulu dan kalau tidak ada jalan keluar baru polisi menangani sesuai hukum yang berlaku. Bagaimana cara menemukan masalah di tengah-tengah warga, kami tidak pernah diberitahu.”

Atas dasar pemahaman tersebut maka anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio menunggu laporan dan pengaduan dari warga atau informasi dari Polsek. Anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio mulai bekerja setelah ada laporan dan pengaduan dari warga atau

ada informasi dari Polsek. Setelah ada warga yang melapor atau mengadu maka anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio mulai merencanakan kegiatan selanjutnya. Oleh karena itu kegiatan anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio bersifat pasif. Anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio tidak secara aktif berusaha mencari dan menemukan masalah di tengah-tengah warga. Padahal disadari bahwa tatap muka dan wawancara akan memiliki manfaat yang lebih baik dari sekedar menunggu warga melapor atau mengadu. Dalam wawancara dan tatap muka, individu cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang diketahui atau dialami. Melalui tatap muka dan wawancara dengan warga anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) akan dapat lebih memahami permasalahan yang ada di tengah-tengah warga. Permasalahan yang diperoleh akan dipahami lebih akurat dan dapat diketahui secara dini.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan warga di kedai kopi di Dusun 3. Beberapa warga sangat antusias berdiskusi setelah peneliti menyampaikan maksud penelitian kepada mereka. Masalah kemitraan antara polisi dan masyarakat menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Suasana yang tidak formal, bebas dan tidak terikat membuat pertemuan menjadi menarik. Beberapa warga memberi komentar mereka mengenai pandangan mereka terhadap anggota polisi dan anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio saat ini khususnya anggota Polsek Bangun. Seorang warga menerangkan kondisi kemitraan warga dengan Polsek Bangun :

”Di dusun ini kemitraan polisi dan warga masih jauhlah bang. Mana bisa akrab kalau polisi saja jarang mau datang ke warga untuk menanyakan situasi keamanan. Kalaupun mereka datang polisi hanya menemui orang tertentu saja yang mereka kenal setelah itu pergi.”

Warga lain mengatakan:

”Bagaimana bisa bermitra dengan baik antara polisi dan masyarakat bang, setiap ada urusan dengan polisi pasti pakai uang. Masyarakat pun malas jumpa sama polisi. Kalaupun ada pencurian kebanyakan warga sini tidak mau lapor. Nanti mereka datang lihat-lihat setelah itu minta rokok.”

Pandangan warga terhadap Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio, masalah kemitraan antara polisi dan masyarakat lebih terbuka ketika warga menyadari bahwa percakapan tersebut informal dan tidak mengikat. Dalam kesempatan itu warga menyampaikan pandangannya kepada peneliti tentang anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio. Menurut warga pembentukan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio bukan merupakan keinginan warga namun dibentuk oleh Polsek hanya untuk mengejar target dari Polda. Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio diisi oleh orang-orang yang kenal dekat dengan Polsek. Seorang warga mengatakan:

“Pembentukan FKPM tidak melibatkan warga secara keseluruhan. Mana pernah polisi mengajak warga untuk membentuk FKPM. FKPM yang sekarang tidak melalui pemilihan dan mereka bukan mewakili warga. Anggota FKPM yang sekarang harus dirombak, karena mereka tidak memiliki posisi kuat di dalam warga. Anggota FKPM sekarang hanya mereka yang dekat dengan polisi saja.”

Dalam kesempatan yang sama warga juga mengeluhkan masalah pencurian di Dusun 3. Pencurian yang sering terjadi adalah pencurian mesin genset, aki mobil, jemuran bahkan tiangnya pun ikut diambil. Banyak masalah pencurian yang tidak diketahui oleh polisi karena warga tidak melapor. Warga tidak melapor kepada polisi karena warga tidak yakin kalau polisi akan menangani laporan tersebut dengan serius. Warga tidak mengadu ke anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio karena sebagian besar warga tidak mengetahui lembaga Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio. Walaupun sudah ada warga mengetahui lembaga Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio namun warga tidak mengenal anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio. Sejak dibentuk anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio belum pernah melakukan sosialisasi secara resmi kepada warga. Seorang warga mengatakan:

”Kami mendengar kalau di nagori ini sudah ada FKPM, tapi kami tak tahu siapa saja anggotanya. Anggota FKPM yang adapun belum pernah

mendatangi kami warga Dusun 3. Makanya setelah peresmian kantor BKPM warga tidak ada melihat kegiatan lanjutan di kantor BKPM.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti lakukan dengan menyebar angket kepada warga dengan menanyakan apakah warga mengetahui lembaga FKPM Nagori Senio maka diperoleh hasil sebagai berikut; 69% warga mengatakan tidak mengetahui lembaga FKPM Nagori Senio dan 32% warga mengatakan mengetahui lembaga FKPM Nagori Senio. Mayoritas warga yang mengetahui lembaga FKPM Nagori Senio adalah warga yang merupakan bagian dari komunitas berdasarkan kepentingan seperti Guru, Ketua LPM, Pangulu, dan pengurus organisasi.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti lakukan dengan menyebar angket kepada warga dengan menanyakan apakah warga mengenal anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio maka diperoleh hasil sebagai berikut; 66% warga mengatakan tidak mengenal anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dan 25% warga mengatakan mengenal anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio. Mayoritas warga yang mengenal anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio adalah warga yang merupakan bagian dari komunitas berdasarkan kepentingan seperti Guru, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pangulu, dan pengurus organisasi, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1..

Tabel 5.1.: Data Tingkat Pengenalan Warga Terhadap Anggota FKPM Nagori Senio.

Apakah Warga Mengetahui Anggota FKPM	Komunitas				Jlh	%
	Geografis	%	Kepentingan	%		
Ya	14	20	11	42	25	25
Tidak	55	73	12	46	67	66
Tidak Menjawab	6	7	3	12	9	9
Jumlah	75	100	26	100	101	100

Dari hasil survei yang peneliti lakukan dengan menyebar angket kepada warga dengan menanyakan apakah anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio mengunjungi warga maka diperoleh hasil sebagai berikut: 91% warga mengatakan anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio tidak mengunjungi warga dan 8% warga mengatakan anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio mengunjungi warga, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.2..

Tabel 5.2. : Data Kegiatan Kunjungan Anggota FKPM Kepada Warga

Apakah Anggota FKPM Mengunjungi Warga	Komunitas				Jlh	%
	Geografis	%	Kepentingan	%		
Ya	2	3	6	23	8	8
Tidak	72	96	20	77	92	91
Tidak Menjawab	1	1	-	-	1	1
Jumlah	75	100	26	100	101	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggota FKPM Nagori Senio tidak bekerja secara aktif. Anggota FKPM Nagori Senio belum melakukan sosialisasi tentang lembaga FKPM kepada warga. Anggota FKPM Nagori Senio mengidentifikasi permasalahan yang ada di tengah-tengah warga dengan menunggu laporan atau aduan dari warga atau menunggu informasi dari Polsek.

Dalam kesempatan lain dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap warga, seorang mengeluhkan masalah kabel listrik PLN di Dusun 3 yang jarak antara satu tiang dengan tiang lain terlalu jauh sehingga kabel terlalu rendah dan sangat berbahaya jika ada warga yang melintas membawa jinjingan. Warga tersebut menerangkan:

”Masalah ketidaktertiban seperti yang abang bilang, di dusun ini ada kabel listrik yang terlalu rendah karena jarak antara satu tiang dengan yang lain terlalu jauh. Kami sudah pernah mengadu ke PLN tapi sampai sekarang belum ada yang datang memperbaiki. Kami juga tidak melapor kepada polisi karena buat apa, itu kan bukan bidang mereka.”

Masalah kabel PLN merupakan masalah yang luput dari perhatian anggota FKPM Nagori Senio. Hal ini disebabkan karena anggota FKPM Nagori Senio

tidak melakukan kegiatan sosialisasi, tidak melakukan kunjungan dan tidak melakukan pengumpulan pendapat masyarakat secara pantas. Sebagian besar warga tidak mengetahui lembaga FKPM Nagori Senio, tidak mengenal anggota FKPM Nagori Senio, dan akibatnya anggota FKPM Nagori Senio tidak dapat mengidentifikasi masalah yang aktual yang sedang terjadi di tengah-tengah warga. Anggota FKPM Nagori Senio melihat suatu peristiwa sebagai masalah ketika peristiwa/permasalahan tersebut dilaporkan atau diadukan oleh warga atau ketika polisi menginformasikan peristiwa tersebut kepada anggota FKPM.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang Ibu penjaga kantin di MTs Negeri Siantar dan menanyakan tentang keberadaan FKPM Nagori Senio. Ia mengatakan mendengar tentang adanya FKPM namun tidak tahu siapa anggotanya dan apa maksud pembentukannya. Menurutnya polisi mau datang kalau ada masalah. Masalah yang ada disekitar sekolah adalah anak-anak yang suka bolos, merokok, main judi dan bermain play station pada saat jam pelajaran.

Pagawai tata usaha SMP Teladan Simalungun menerangkan bahwa masalah pelajar yang perlu diperhatikan oleh polisi adalah anak-anak sekolah yang berkeliaran di pusat keramaian pada jam pelajaran dan masih menggunakan seragam sekolah. Pihak sekolah sudah pernah mengirim surat ke Polsek dan sudah ditanggapi dengan melakukan razia terhadap pelajar yang berkeliaran pada saat jam pelajaran. Tapi kegiatan tersebut beberapa bulan ini sudah tidak ada.

Masalah kenakalan pelajar juga luput dari perhatian FKPM Nagori Senio karena anggota FKPM Nagori Senio tidak secara aktif mengidentifikasi masalah dan akibatnya beberapa masalah yang meresahkan warga, masalah kenakalan remaja atau pelajar menjadi tidak tertangani dengan layak. Untuk mendapat informasi tersebut anggota FKPM harus melakukan dialog dengan warga dan guru sekolah. Dialog dapat dilakukan secara resmi dengan melakukan pertemuan khusus maupun dialog secara tidak resmi.

Untuk melaksanakan pekerjaan khusus seperti melakukan observasi, survei dan melakukan pengamatan terlibat tentu memerlukan waktu yang khusus. Melakukan wawancara, tatap muka, dan survei memerlukan persiapan-persiapan terutama mengenai materi, personil, waktu dan kegiatan tersebut membutuhkan kemampuan teknis. Materi wawancara dan survei harus dipersiapkan dan

disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Anggota yang dilibatkan harus meluangkan waktu sementara semua anggota FKPM Nagori Senio memiliki kesibukan masing-masing. Seluruh anggota FKPM Nagori Senio memiliki pekerjaannya yang tidak mungkin bisa mereka tinggalkan. Oleh karena itu kegiatan anggota FKPM Nagori Senio disesuaikan dengan pekerjaan mereka agar tidak terjadi benturan. Oleh karena itu anggota FKPM Nagori Senio dalam melaksanakan tugas dan peranannya sebagai anggota FKPM dilakukan bersamaan dengan aktifitas dan rutinitas sehari-hari tanpa melalui proses perencanaan dan tanpa target tertentu. Anggota FKPM Nagori Senio mengatakan:

”Kami anggota FKPM tidak pernah melakukan kunjungan khusus ke rumah-rumah warga dan juga belum pernah melakukan survei untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi warga. Kami menunggu warga yang akan melapor atau mengadu. Kami juga sulit membagi waktu jika harus melakukan kunjungan atau melakukan survei karena kami memiliki pekerjaan masing-masing. Untuk bertemu saja kami jarang. Waktu kami sangat terbatas karena terikat dengan pekerjaan”.

Untuk melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga atau melakukan survei untuk mengetahui permasalahan yang ada di tengah-tengah warga tentunya juga membutuhkan biaya. Melakukan kegiatan khusus berupa kunjungan (tatap muka), wawancara ataupun survei pasti memerlukan sarana pendukung seperti transportasi, alat tulis, mesin tik atau komputer, dan lain-lain. BKPM Kec. Gunung Malela yang menjadi sekretariat FKPM yang ada di wilayah hukum Polsek Bangun sampai sekarang belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang layak sebagai sebuah kantor. FKPM Nagori Senio sampai saat ini tidak memiliki anggaran khusus baik dari Polsek maupun dari Kecamatan maupun Pangulu. Oleh karena itu anggota FKPM Nagori Senio belum pernah dan belum punya rencana untuk menyusun program melakukan kunjungan, wawancara maupun survei terhadap warga. Anggota FKPM Nagori Senio menerangkan:

”Sampai saat ini FKPM Nagori Senio tidak memiliki anggaran. Kantor BKPM saja tidak ada apa-apanya, yang ada hanya kursi dan meja, itupun warga yang menyiapkan. Oleh karena itu kalau ada kegiatan FKPM memerlukan dana maka kamilah anggota FKPM yang tekor. Karena tidak

ada dana maka kami belum membuat program kegiatan karena kalau ada kegiatan maka pasti memerlukan biaya tambahan”.

Pemahaman anggota FKPM Nagori Senio terhadap masalah yang perlu ditangani sangat terbatas. Anggota FKPM Nagori melihat suatu permasalahan berdasarkan laporan atau aduan dari warga, akibatnya anggota FKPM Nagori Senio dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan permasalahan yang dilaporkan atau diadukan oleh warga. Hal ini diakui oleh anggota FKPM karena kurangnya penjelasan yang diberikan oleh Polsek baik itu Kapolsek Bangun maupun oleh Ba.Polmas. Anggota FKPM menerangkan bahwa:

”Sejak FKPM terbentuk anggota FKPM kurang mendapat perhatian dari Polsek. Komunikasi anggota FKPM hanya dengan anggota Ba.Polmas. Sementara anggota Ba.Polmas tidak berani membuat keputusan dan kurang memahami tentang Polmas. Oleh karena itu kegiatan anggota FKPM sangat terbatas.”

Pada umumnya masalah yang dilaporkan atau diadukan kepada anggota FKPM Nagori Senio adalah masalah pribadi warga yang sebagian besar mempunyai urusan dengan polisi terutama yang berkaitan dengan kriminal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan anggota FKPM Nagori Senio yang mengatakan bahwa selama ini masalah warga yang pernah mereka tangani adalah masalah perkelahian antar warga. Warga akan mengadu atau mengeluh ketika ada keluarga mereka yang ditahan oleh polisi. Keluhan atau aduan itulah yang dianggap sebagai masalah oleh warga karena memang kenyataan bahwa hampir semua laporan atau aduan yang disampaikan warga kepada anggota FKPM Nagori Senio adalah ketika mereka mempunyai urusan dengan Polsek. Anggota FKPM Nagori Senio menerangkan: ”Biasanya Pak warga mengadu kepada kami apabila ada keluarganya yang ditahan Polsek. Kalau mereka sudah ditangkap dan ditahan oleh Polsek baru mereka melapor ke anggota FKPM”.

Dalam menangani kasus penganiayaan/pengeroyokan yang dilakukan oleh tersangka ”AP” Cs terhadap korban ”AS”, anggota FKPM Nagori Senio menerima pengaduan dari orang tua tersangka ketika mereka sedang bertemu dan berbincang-bincang dengan warga lain di kedai kopi. Pengaduan tersebut dicatat dalam Surat Pengaduan No:SP/01/8/2006 hari Jumat tanggal 25 Agustus 2006.

Orangtua tersangka mengetahui lembaga FKPM dari salah satu keluarganya yang bertetangga dengan salah satu anggota FKPM Nagori Senio. Sudah menjadi kebiasaan warga Nagori Senio berkumpul di kedai kopi pada malam hari setelah kembali dari pekerjaan masing-masing. Dalam pertemuan di kedai kopi tersebut semua masalah dibicarakan dan dibahas mulai dari masalah ekonomi, politik, hukum sampai masalah di ladang. Pertemuan informal tersebut dirasakan oleh warga Nagori Senio menambah kuat kohesi sosial. Dalam percakapan tersebut pada suatu saat orang tua tersangka "AP" mendekati anggota FKPM Nagori Senio dan mengadukan permasalahannya kepada anggota FKPM Nagori Senio. Orang tua tersangka "AP" mengadukan masalahnya karena 2 (dua) anaknya yang masih sekolah sedang ditahan di Polsek. Kepada anggota FKPM Nagori Senio orang tua tersangka "AP" mengatakan:

"Pak tolong bantulah saya, 2 (dua) anak saya saat ini ditahan Polsek. Mereka memukul si "AS" tiga hari yang lalu di sawah. Masalahnya "AS" menutup saluran air yang ada di sawahnya sehingga sawah kami tidak kebagian air. Hari itu anak saya si "AP" dan adiknya membuka tutup saluran air itu, karena dilarang maka kedua anak saya itu memukul si "AS". Anak saya "AP" sedang kuliah dan adiknya masih pelajar SMU. Tolonglah, kasihan anak-anak tidak bisa sekolah".

Dalam penanganan kasus pencurian ternak yang dialami oleh Sdr."L", anggota FKPM Nagori Senio mengetahui permasalahan dari korban. Korban yang kebetulan tetangga salah seorang anggota FKPM Nagori Senio mengadukan masalahnya kepada anggota FKPM Nagori Senio di kediamannya. Karena mengetahui ada FKPM maka korban tidak melapor ke Polsek tetapi mengadu kepada anggota FKPM Nagori Senio terlebih dahulu. Dalam pengaduannya kepada anggota FKPM Nagori Senio, korban mengatakan: " Pak, saya kehilangan ayam kemarin. Ada yang mengatakan kalau yang mengambil anak si "P". Tolong kasitahu dia supaya dikembalikan kalau tidak saya lapor polisi".

Dari 2 (dua) kasus yang ditangani oleh FKPM Nagori Senio maka masalah yang ditangani oleh FKPM Nagori Senio adalah kasus penganiayaan dan pencurian. Kedua masalah tersebut diketahui oleh anggota FKPM Nagori Senio

langsung dari warga setelah warga mengadu atau melapor bahwa anaknya ditahan dan ternaknya hilang.

Selain menerima informasi, keluhan atau pengaduan langsung dari warga, anggota FKPM Nagori Senio juga menerima informasi tentang perkelahian, perusakan, pengancaman dan lain-lain yang sifatnya konflik antar warga dari polisi. Warga yang langsung mengadu ke Polsek adalah warga yang belum mengetahui dan tidak mengenal anggota FKPM Nagori Senio. Laporan polisi yang dibuat oleh warga ke Polsek, kemudian diteliti oleh Kapolsek dan jika dimungkinkan untuk di selesaikan di luar Sistem Peradilan Pidana maka Kapolsek menyerahkan persoalan tersebut kepada anggota FKPM Nagori Senio untuk diselesaikan sendiri dengan warga. Kapolsek Bangun menjelaskan:

“Di wilayah kami sering terjadi perkelahian warga. Biasanya masalah sepele seperti mabuk dan rebutan air irigasi di sawah. Karena FKPM Nagori Senio belum diketahui banyak oleh warga maka korban biasanya langsung lapor ke Polsek. Setelah saya menilai kasus tersebut ringan maka saya menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada FKPM”..

Namun sampai saat penelitian dilakukan belum ada masalah yang ditangani FKPM Nagori Senio berasal dari informasi Polsek. Semua keluhan, pengaduan warga dan informasi yang datang dari polisi yang diterima oleh anggota FKPM kemudian dicatat oleh anggota Ba.Polmas yang juga menjabat sebagai sekretaris FKPM Nagori Senio. Berdasarkan laporan tersebut maka kemudian anggota FKPM Nagori Senio mulai merencanakan pertemuan dengan warga untuk membahas masalahnya.

5.2. Mengadakan Pertemuan Dengan Warga

Pertemuan yang diadakan oleh FKPM bertujuan untuk membangun kolaborasi antara polisi dan warga dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah warga. Pertemuan dengan masyarakat merupakan alat paling efisien untuk mempelajari permasalahan, kebutuhan, dan prioritas masyarakat. Oleh karena itu dalam pertemuan sedapat mungkin dihadiri semua elemen yang ada dalam masyarakat. Sub-sub kelompok yang ada dalam komunitas harus dilibatkan dalam pertemuan karena kemungkinan banyak pendapat-pendapat lain

yang berkembang luas dalam masyarakat. Pertemuan akan menjadi menarik jika masalah yang dibahas dalam pertemuan merupakan masalah yang aktual bagi warga. Masalah kejahatan serius seperti perampokan, penyeludupan, *illegal logging*, *trafficking in child* dan *trafficking in person* belum tentu merupakan masalah penting bagi warga.

Untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pertemuan anggota FKPM harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain: Tempat—tempat pertemuan harus nyaman, mudah dicapai dan memungkinkan juga bagi orang yang tidak mampu fisik seperti cacat dan orang tua, Waktu—waktu pertemuan harus memperhatikan kegiatan mayoritas warga dan petugas, harus ada penyesuaian agar waktu pertemuan tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain, Transportasi—bagi warga yang berpenghasilan rendah sangat penting untuk memperhatikan masalah transportasi. Kegagalan meraih partisipasi warga sering terjadi karena masalah transportasi terutama bagi orang manula yang sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai pendukung implementasi pemolisian komunitas, Keamanan—warga yang diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan harus memiliki keyakinan bahwa mereka akan aman baik pada saat datang maupun setelah kembali dari pertemuan, dan Publikasi—agar warga yang ditargetkan dapat hadir dalam pertemuan maka undangan tertulis harus didukung dengan pemberitahuan secara lisan. Pemberitahuan secara lisan kepada warga dapat juga memanfaatkan jasa media cetak maupun media elektronik (Trojanowicz dan Bucqueroux, 1998:60).

Sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:433/VII/2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat, maka pertemuan dengan warga sebenarnya memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh anggota FKPM dalam pertemuan dengan warga adalah:

- (1) Anggota FKPM dapat memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan secara aktual.
- (2) Anggota FKPM dapat menerima masukan dari warga mengenai masalah kejahatan dan ketidaktertiban yang meresahkan warga.
- (3) Anggota FKPM dapat menerima informasi, kritik dan keluhan warga terhadap prilaku anggota polisi.

- (4) Anggota FKPM dapat menerima masukan dari warga mengenai program kerja FKPM agar sesuai harapan warga.
- (5) Anggota FKPM dapat mempengaruhi warga untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan dan menaati peraturan.
- (6) Anggota FKPM dapat memanfaatkan pertemuan tersebut untuk mensosialisasikan program-program FKPM Nagori Senio.
- (7) Anggota FKPM dapat memberdayakan warga agar turut mendukung program kerja FKPM Nagori Senio.

Dengan mengetahui program-program FKPM dan ikut terlibat memberikan masukan dalam penyusunan program FKPM akan lebih memudahkan FKPM memperoleh dukungan dan partisipasi warga. Partisipasi warga tersebut tentunya menambah peluang bagi FKPM untuk lebih eksis di tengah-tengah warga.

Pertemuan juga bermanfaat bagi Polsek. Keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan pertemuan adalah Polsek dapat menyampaikan program kerja Polsek kepada warga. Dalam pertemuan dengan warga Polsek juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi polisi pada saat melaksanakan tugas sehingga warga dapat memahami kendala tersebut dan sedapat mungkin bisa membantu polisi. Dalam pertemuan itu juga polisi dapat mengajak warga untuk taat hukum dan berpartisipasi menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.

Anggota FKPM Nagori Senio mengadakan pertemuan dengan warga setelah menerima laporan atau pengaduan dari warga atau setelah menerima informasi kejahatan atau perselisihan antar warga dari Polsek. Topik bahasan dalam pertemuan adalah masalah yang dilaporkan warga kepada anggota FKPM Nagori Senio atau kasus yang diinformasikan oleh Polsek melalui Ba.Polmas. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah adanya kesepakatan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu dalam pertemuan pembahasan dilakukan berkaitan dengan latar belakang masalah dan solusi perdamaian (jalan keluar).

Sebelum melaksanakan pertemuan dengan warga, anggota FKPM Nagori Senio terlebih mengadakan rapat internal. Dalam rapat internal anggota FKPM Nagori Senio menentukan tempat pertemuan, waktu pertemuan, pihak yang akan

dilibatkan dalam pertemuan dan merumuskan alternatif solusi yang mungkin dapat diambil.

Masalah yang akan dibahas dalam pertemuan harus fokus pada masalah komunitas dimana masalah terjadi sehingga pihak-pihak yang dilibatkan dalam pertemuan tersebut diutamakan warga komunitas tersebut. Di Nagori Senio komunitas berdasarkan geografis ada sebanyak 3 (tiga) komunitas sedangkan komunitas berdasarkan kepentingan ada sebanyak 26 (dua puluh enam) komunitas.

FKPM Nagori Senio mengadakan kegiatan pertemuan dengan warga setelah ada masalah yang dilaporkan oleh warga kepada anggota FKPM atau setelah menerima informasi dari Polsek. Pertemuan yang diselenggarakan oleh anggota FKPM Nagori Senio didasarkan pada ada tidaknya laporan atau pengaduan dari warga dan informasi dari Polsek. Setelah warga mengadu atau melapor atau ada informasi dari Polsek maka kemudian diadakan pertemuan dengan warga. Sesuai dengan aturan makan pertemuan dilaksanakan di BKPM Kec.Gunung Malela. Namun pada penanganan masalah selanjutnya pertemuan dilaksanakan di rumah salah satu anggota FKPM Nagori Senio. Dari hasil wawancara dengan warga diperoleh keterangan bahwa warga menghendaki pertemuan diadakan di tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal warga. Warga Nagori Senio sebagian besar bekerja sebagai buruh, petani, pedagang, dan karyawan di perkebunan. Dengan penghasilan tersebut sebagian besar warga tidak memiliki kendaraan pribadi. Lokasi pertemuan yang jauh dari pemukiman warga tentunya akan mengurangi minat warga menghadiri atau berpartisipasi dalam pertemuan. Seorang warga menerangkan:

”Kantor BKPM yang sekarang tidak pernah digunakan. Saya pun heran kenapa harus dibuat BKPM. Lokasinya saja cukup jauh dari pemukiman warga. Kalau untuk membahas masalah kenapa harus kita di BKPM, kan bisa di rumah warga atau rumah Pangulu yang lokasinya lebih dekat. Kalau ke Kantor Polsek malah lebih jauh dan warga pasti keberatan”.

Pertemuan dengan warga biasanya dilaksanakan setelah anggota FKPM Nagori Senio menerima keluhan atau pengaduan dari warga atau mendapat informasi dari Polsek. Setelah menerima pengaduan dari warga atau mendapat

informasi dari Polsek maka anggota FKPM Nagori Senio mulai merencanakan pertemuan. Perencanaan pertemuan dibahas dalam rapat internal FKPM Nagori Senio. Anggota FKPM Nagori Senio menerangkan:

”Pertemuan anggota FKPM dengan warga biasanya kami laksanakan setelah adanya keluhan atau pengaduan dari warga atau ada informasi dari Polsek. Kami menilai bahwa perlu tidaknya diadakan pertemuan adalah setelah mengetahui adanya masalah warga yang harus diselesaikan dan biasanya kalau tidak ada masalah yang diadukan atau tidak ada informasi dari Polsek maka tidak ada pertemuan.”

Sebelum pertemuan dengan pihak-pihak yang berselisih dilakukan, maka terlebih dahulu diadakan rapat internal anggota FKPM Nagori Senio. Dalam rapat internal tersebut anggota FKPM Nagori Senio membahas masalah yang dilaporkan oleh warga berdasarkan masukan dan informasi yang telah diperoleh tiap-tiap anggota FKPM Nagori Senio di lapangan. Informasi atau bahan keterangan tersebut berkaitan dengan latar belakang masalah, kerugian dan instansi mana yang terkait dengan masalah tersebut. Hasil rapat internal tentunya akan disampaikan kepada pihak yang terkait. Dalam rapat internal anggota FKPM Nagori Senio menentukan tempat pertemuan, waktu pertemuan, pihak yang akan dilibatkan dalam pertemuan dan merumuskan alternatif solusi yang mungkin dapat diambil.

Selama ini masalah warga yang pernah ditangani oleh FKPM Nagori Senio semuanya berhubungan dengan Polsek. Masalah yang telah ditangani oleh FKPM Nagori Senio adalah masalah perkelahian yang pelakunya ditahan oleh Polsek. Apabila masalah tersebut berhubungan dengan Polsek maka hasil rapat internal terlebih dahulu disampaikan oleh anggota FKPM Nagori Senio bersama Ba.Polmas kepada Kapolsek Bangun. Anggota FKPM Nagori Senio bersama Ba.Polmas melaporkan kepada Kapolsek Bangun masalah tersebut dan meminta Kapolsek menanggapi hasil rapat internal yang telah dilakukan oleh anggota FKPM. Selanjutnya hasil pertemuan dengan Kapolsek Bangun dijadikan pedoman dalam pertemuan dengan warga yang berselisih. Dengan modal tersebut maka anggota FKPM lebih mantap mengadakan pertemuan dengan pihak yang berselisih. Anggota FKPM Nagori Senio menerangkan:

”Warga yang melapor biasanya adalah mereka yang ada anggota keluarganya ditahan di Polsek. Mereka mengadu ke anggota FKPM meminta tolong agar keluarganya yang ditahan karena terlibat perkelahian dapat dikeluarkan. Oleh karena itu agar pertemuan tidak sia-sia maka kami anggota FKPM terlebih dahulu mengadakan rapat internal dan melaporkan hasilnya kepada Kapolsek. Setelah ada keputusan dari Kapolsek baru pertemuan kami laksanakan.”

Pertemuan dengan warga yang terlibat perselisihan dilaksanakan setelah anggota FKPM Nagori Senio menerima masukan dari Kapolsek Bangun. Masukan tersebut biasanya persetujuan atas alternatif solusi yang diajukan sesuai hasil keputusan dalam rapat internal anggota FKPM Nagori Senio. Anggota FKPM Nagori Senio menerangkan :

“Pertemuan dengan pihak-pihak yang bersengketa dilaksanakan setelah ada solusi dari hasil pertemuan dengan Kapolsek. Solusinya adalah kesediaan Kapolsek mendukung hasil pertemuan. Misalnya kalau ada perdamaian maka Kapolsek bersedia menanggihkan penahanan dan menghentikan penyidikan. Apabila keputusan diterima oleh pihak yang berselisih maka permasalahan dianggap selesai tetapi jika keputusan FKPM tidak diterima maka masalah diserahkan kepada Polsek untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku.”

Setelah anggota FKPM Nagori Senio mendapat keyakinan akan mendapat dukungan dari Kapolsek atas alternatif keputusan yang telah dibuat maka mulai direncanakan pertemuan dengan warga. Pelaksanaan pertemuan baik tempat, waktu, dan pihak yang dilibatkan dalam pertemuan ditentukan dalam rapat internal yang telah dilakukan.

Dalam menangani kasus penganiayaan/pengeroyokan yang dilakukan oleh tersangka ”AP” Cs terhadap korban ”AS”, pertemuan dilaksanakan di Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) Kecamatan Gunung Malela. Pertemuan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2006 pukul 10.00 Wib. Dalam pertemuan yang diundang adalah pihak keluarga tersangka ”AP”, pihak korban ”AS” dan keluarganya, Pangulu Nagori Senio, Pangulu Nagori Serapu

(karena korban "AS" adalah warga Nagori Serapu) dan anggota FKPM Nagori Senio. Pertemuan dimulai pukul 10.00 Wib dan selesai pada pukul 12.00 Wib.

Dalam menangani kasus pencurian ternak yang dialami oleh Sdr."L", pertemuan dilaksanakan di rumah salah satu anggota FKPM Nagori Senio. Yang hadir dalam pertemuan adalah korban sebagai pelapor, pihak keluarga tersangka dan pelaku, Kepala Dusun (Gamot) Dusun 2 dan anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio.

Dalam pertemuan Ketua FKPM Nagori Senio memimpin langsung pertemuan. Pertemuan dilaksanakan secara informal tanpa susun acara. Ketua FKPM Nagori Senio menjelaskan permasalahan kepada peserta pertemuan dan solusi yang mungkin diambil. Setelah dibacakan maka masing-masing pihak memberikan masukan-masukan terhadap butir-butir perdamaian. Setelah masing-masing pihak setuju maka butir-butir pernyataan perdamaian yang dibuat dalam Berita Acara Perdamaian.

Dalam setiap pertemuan dalam menyelesaikan permasalahan anggota FKPM selalu mengundang unsur pemerintah setempat seperti Camat, Pangulu, Tomas, Toga, Toda dan anggota penyidik. Undangan dilakukan secara lisan. Misalnya untuk Kapolsek anggota Ba.Polmas yang menginformasikan, untuk Camat yang menyampaikan adalah Sdr.Suwarno yang juga sebagai Pangulu Nagori Senio. Tujuannya agar pertemuan tersebut memiliki kekuatan. Anggota FKPM Nagori Senio menerangkan:

"Agar pertemuan tersebut kuat hasilnya maka kami juga mengundang aparat kecamatan dan nagori termasuk tokoh masyarakat. Tujuannya supaya hasil pertemuan lebih kuat, warga yang berselisih jadi takut atau seganlah mengulangi perbuatannya Tetapi dalam beberapa kali pertemuan hanya Pangulu saja yang datang".

Dalam pertemuan disediakan konsumsi seadanya. Konsumsi disiapkan oleh pihak yang melapor. Orang yang mengadu atau melapor secara sukarela mengadakan konsumsi dalam pertemuan karena FKPM belum memiliki anggaran. Masalah anggaran juga yang mengakibatkan pertemuan dengan warga tidak dilakukan secara terjadwal sesuai dengan ketentuan forum. Anggota FKPM Nagori Senio menerangkan :

”Kami tidak merencanakan pertemuan setiap seminggu sekali atau setiap sebulan sekali tapi pertemuan kami lakukan apabila ada masalah atau perselisihan saja. Kalau kami yang adakan pertemuan maka kami harus menyiapkan minimal minuman. Kalau enggak ada maka orangpun malas datang. Sementara FKPM Nagori Senio belum pernah mengadakan pertemuan karena enggak punya anggaran. Makanya kami belum pernah mengadakan pertemuan yang sifatnya terjadwal yang tujuannya untuk menerima masukan dari warga mengenai permasalahan di tengah-tengah warga.”

5.3. Memecahkan Masalah

Pemecahan masalah adalah proses analisis dan strategi untuk mengidentifikasi dan menemukan solusi masalah melalui kolaborasi warga dan polisi. Yang dimaksud dengan masalah dalam konsep Pemolisian Komunitas adalah dua kejadian atau lebih yang memiliki kesamaan dalam satu unsur atau lebih dapat menyebabkan terjadinya kejahatan, rasa takut dan ketidaktertiban dalam lingkungan warga. Suatu masalah berbeda dari satu kejadian tunggal yang terpisah. Sedikit sekali kejadian-kejadian terpisah yang menjadi perhatian polisi dan harus dihadapi secara terpisah pula. Namun demikian, banyak kejahatan, ketidaktertiban dan rasa takut dalam masyarakat saling terkait (misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau perkelahian antar pemuda yang berulang-ulang). Suatu kejadian yang dianggap sebagai masalah setelah memenuhi dua kriteria berikut:

- (1) Suatu masalah melibatkan sejumlah kejadian yang berulang atau berhubungan.
- (2) Masalah tersebut menjadi perhatian warga dan polisi.

Hubungan antara kejadian-kejadian yang saling berkaitan dengan kejadian-kejadian lainnya dapat dilihat dengan cara memfokuskan pada karakteristik tertentu. Fokus tersebut adalah: Prilaku—kejadian yang terjadi dengan modus operandi yang sama, Wilayah—kejadian-kejadian yang terkonsentrasi di wilayah tertentu, Orang—kejadian-kejadian dimana pelaku atau korban memiliki

kemsamaan, dan Waktu—kejadian-kejadian yang saling berkaitan karena terjadi pada waktu-waktu tertentu.

FKPM Nagori Senio melihat suatu kejadian sebagai masalah ketika ada warga yang mengadu atau pada saat menerima informasi dari Polsek. Setiap aduan atau laporan warga dan informasi dari Polsek diperlakukan sebagai suatu masalah yang perlu ditangani oleh FKPM. Masalah yang tepat untuk dipecahkan oleh FKPM adalah suatu kejadian atau permintaan bantuan yang terulang kembali, atau berhubungan dengan kejadian lain. Seperti kasus pencurian yang sering terjadi di Dusun 3 sebagaimana yang disampaikan warga kepada peneliti. Seorang warga Dusun 3 mengatakan:

“Nagori Senio ini nampak tenang-tenang saja Pak, karena warganya banyak yang bekerja ke kebun pada pagi dan siang hari dan kembali pada sore hari, tapi wilayah sini bukannya aman Pak. Di sini sering terjadi pencurian seperti pencurian Genset, Aki Mobil, besi jemuran, sandal dan sepatu. Sampai sekarang kasus ini belum tuntas”.

Masalah diperoleh atau diketahui oleh anggota FKPM Nagori Senio dari laporan warga maupun informasi dari Polsek. Masalah sesuai dengan laporan warga atau informasi dari Polsek biasanya adalah kasus. Masalah yang sudah pernah ditangani oleh anggota FKPM Nagori Senio adalah kasus penganiayaan dan kasus pencurian yang sifatnya sangat pribadi. Kasus ini belum tentu menjadi masalah bagi warga sekitar, sehingga dalam pertemuan pembahasan masalah tersebut yang hadir adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Anggota FKPM Nagori Senio setelah mengetahui adanya suatu masalah yang ditandai dengan adanya laporan atau pengaduan dari warga atau menerima informasi dari polisi kemudian mengadakan rapat internal. Rapat internal dihadiri oleh semua anggota FKPM Nagori Senio termasuk Ba.Polmas. Rapat internal dipimpin langsung oleh Ketua FKPM Nagori Senio. Dalam rapat internal yang dibahas adalah latar belakang permasalahan, menentukan waktu dan tempat pertemuan, menentukan peserta yang akan diundang dalam pertemuan, dan menentukan solusi-solusi yang mungkin diambil. Dalam rapat internal tersebut proses pemecahan masalah sudah dimulai.

Herman Goldstein (1979) menjelaskan langkah-langkah pemecahan masalah yang didasarkan pada masalah. Langkah-langkah tersebut antara lain: (1) *Scanning*—para pemangku kepentingan harus mengumpulkan setiap informasi seperti informasi tentang masalah, data, latar belakang dan informasi demografis, survei dan pengaruh seseorang. Tujuannya adalah untuk mendapat gambaran seperti— siapa, apa, kapan, dan dimana (mengenai bagaimana dan mengapa), (2) *Analysis*—disini tim pemecah masalah sepakat tentang bagaimana dan mengapa masalah terjadi. Bagaimanan eskalasi perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga meningkat— langkah-langkah apa yang bisa dilakukan ? Mengapa sering terjadi perkelahian? Tujuannya adalah agar pembahasan tetap fokus pada masalah dengan melihat dari sudut dinamika yang berbeda-beda agar dapat dipahami kondisi-kondisi penyebab terjadinya masalah, (3) *Respond*—tim menggabungkan ide dan mempersempitnya kedalam perencanaan, dengan penugasan yang lebih spesifik dan dalam batasan-batasan tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh pandangan dari setiap peserta, kemudian disimpulkan apakah langkah-langkah tersebut legal, etis, dan dapat dikerjakan. Penting juga diputuskan dalam kondisi bagaiman elemen-elemen tersebut dapat dicoba, dan (4) *Assesment*—tahap ini tim mengembangkan sistem untuk memonitoring rencana dan menentukan strategi menilai dampak. Bagaimana menentukan keberhasilan atau kegagalan. Sering terjadi kesalahan ketika berpikir bahwa keberhasilan adalah ketika kita mampu menghilangkan masalah, padahal realitasnya keberhasilan dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pada kasus perdagangan narkoba di sudut jalan, keberhasilan dapat berarti bahwa pembeli dari luar lingkungan mulai takut, atau kuatir ditangkap. Mungkin pedagang berpindah ke dalam rumah, yang mana hal ini bermanfaat membuat jalanan menjadi aman dan membuat sulit bagi pelanggan atau pengguna pertama untuk mendapatkan obat. Atau mungkin klinik obat menunjukkan peningkatan manusia menjalani pengobatan. Oleh karena itu, jika tim tidak mengetahui dimana letak berbagai keberhasilan, resikonya tim tidak akan menemukannya (Trojanowicz dan Bucqueroux, 1998:43-44).

Pemecahan masalah yang dilakukan oleh Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dimulai sejak adanya rapat internal FKPM. Pembahasan masalah dipimpin oleh Ketua Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat

(FKPM) Nagori Senio. Dalam rapat internal masing-masing anggota FKPM menyampaikan pandangannya mengenai masalah. Kemudian anggota FKPM menyusun butir-butir perdamaian yang dapat diambil dan nantinya akan diajukan ke pada warga yang berselisih. Pemecahan masalah tahap pertama ini dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota FKPM Nagori Senio termasuk anggota Ba.Polmas. Metode pemecahan masalah yang digunakan FKPM tergantung pada keyakinan anggota FKPM tersebut. Tiap-tiap FKPM memiliki cara masing-masing dalam menyelesaikan masalah seperti yang dijelaskan oleh Kabag Bina Mitra Polres Simalungun:

”Dalam memecahkan masalah tidak ada metode baku yang dijadikan landasan anggota FKPM. Masing-masing kelompok FKPM yang ada di Polres Simalungun memiliki teknik sendiri untuk menyelesaikan masalah di daerahnya. Mereka lebih paham dan lebih diterima oleh warga yang bermasalah”.

Dalam menangani kasus penganiayaan/pengeroyokan yang dilakukan oleh Tersangka ”AP” Cs terhadap korban ”AS”, pemecahan masalah dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- (1) Anggota FKPM Nagori Senio menerima laporan atau pengaduan dari orang tua tersangka ”AP”.
- (2) Masalah yang dilaporkan atau diadukan oleh orang tua tersangka ”AP” dibahas dalam rapat internal.
- (3) Dalam rapat internal diperoleh data-data sebagai berikut:
 - Pada hari Jumat sekitar pukul 18.30 Wib, tersangka ”AP” bersama adiknya melakukan pemukulan terhadap korban ”AS”.
 - Pemukulan terjadi karena korban ”AS” melarang tersangka ”AP” dan adiknya membuka saluran air sawah.
 - Saluran air ditutup karena ”AS” sedang memelihara ikan sehingga membutuhkan air. Jika saluran air ditutup maka sawah tersangka ”AP” tidak mendapat air yang cukup.
 - Korban ”AS” mengalami luka dibagian wajah dan membutuhkan perawatan.

- Korban "AS" mengalami kerugian karena ikan emas peliharaannya banyak yang mati karena saluran air di buka oleh tersangka "AP".
- (4) Dari data tersebut maka anggota FKPM Nagori Senio merumuskan butir-butir perdamaian yang mungkin dapat diambil dalam pertemuan. Anggota FKPM Nagori Senio menyusun butir-butir perdamaian sebagai berikut:
- Pihak keluarga tersangka "AP" mengganti biaya pengobatan korban "AS" sampai sembuh.
 - Pihak keluarga tersangka "AP" bersedia mengganti kerugian yang dialami pihak korban "AS".
 - Pihak keluarga "AS" bersedia membuka saluran air untuk pengairan sawah keluarga "AP".
 - Antar pihak keluarga "AP" dan pihak keluarga "AS" saling memaafkan dan bersedia berdamai.
 - Pihak pelapor dalam hal ini Sdr."AS" bersedia mencabut laporannya di Polsek Bangun.
- (5) Butir-butir rencana perdamaian yang telah disusun oleh anggota FKPM Nagori Senio selanjutnya diajukan kepada Kapolsek Bangun. Dalam pertemuan dengan Kapolsek Bangun, anggota FKPM juga menanyakan apakah setelah selesai perdamaian kasus dapat ditutup atau tidak.
- (6) Butir-butir perdamaian yang telah diajukan oleh anggota FKPM Nagori Senio kepada Kapolsek Bangun kemudian di bacakan dalam pertemuan dengan pihak-pihak yang berselisih.
- (7) Butir-butir perdamaian yang telah disusun oleh anggota FKPM Nagori Senio kemudian ditanda-tangani oleh pihak-pihak yang berselisih dan diketahui oleh anggota FKPM Nagori Senio. Setelah semua pihak menandatangani maka masalah dianggap selesai. Hasil perdamaian yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak dan diketahui oleh seluruh anggota FKPM Nagori Senio kemudian di serahkan ke Polsek Bangun. Dengan perdamaian tersebut maka proses penyidikan yang dilakukan Polsek Bangun dihentikan.

Dalam menangani kasus pencurian ternak yang dialami oleh Sdr."L", pemecahan masalah dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- (1) Sdr."L" melapor dan mengadukan masalahnya kepada anggota FKPM Nagori Senio karena ternak ayamnya hilang diambil oleh anak Sdr."P".
- (2) Masalah yang dilaporkan atau diadukan oleh Sdr."L" kemudian dibahas dalam rapat internal FKPM.
- (3) Dalam rapat internal diperoleh data-data sebagai berikut:
 - Anak Sdr."P" bernama "S" telah mencuri ternak ayam milik korban/pelapor Sdr."L".
 - Beberapa warga melihat anak Sdr."P" bernama "S" mengambil ternak ayam milik korban/pelapor Sdr."L".
 - Sdr."S" mengaku telah mencuri ternak ayam milik Sdr."L" dan telah dijual kepada orang lain.
- (4) Dari data tersebut maka anggota FKPM Nagori Senio merumuskan butir-butir perdamaian yang mungkin dapat diambil dalam pertemuan. Anggota FKPM Nagori Senio menyusun butir-butir perdamaian antara lain:
 - Sdr."P" mengganti kerugian ternak ayam kepada korban/pelapor Sdr."L".
 - Masing-masing pihak saling memaafkan dan tidak menuntut setelah seluruh kerugian diganti.
- (5) Butir-butir perdamaian yang telah dibuat oleh anggota FKPM Nagori Senio kemudian di bacakan dalam pertemuan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berselisih.
- (6) Butir-butir perdamaian yang telah disusun dianggap selesai setelah ditanda-tangani oleh pihak-pihak yang berselisih dan diketahui oleh seluruh anggota FKPM Nagori Senio. Setelah adanya kesepakatan tersebut maka Sdr. "L" tidak jadi membuat laporan ke polisi.

Dalam proses pemecahan masalah anggota Ba.Polmas yang juga adalah sekretaris FKPM Nagori Senio tetap ikut hadir dalam pertemuan. Anggota Ba.Polmas berperan sebagai pengamat dan pengawas pertemuan agar hasil

pertemuan tetap sejalan dengan aturan yang berlaku. Anggota Ba.Polmas mencatat hasil pertemuan dalam buku agenda kerja FKPM dan melaporkan kegiatan tersebut ke Polsek sebagai hasil kegiatan BKPM Kec.Gunung Malela. Anggota Ba.Polmas menerangkan:

”Memang Pak dalam petunjuknya Ba.Polmas walaupun dia sebagai anggota FKPM tapi tidak boleh terlibat dalam pembahasan masalah. Kami Ba.Polmas hanya mengamati dan mencatat hasil pertemuan sebagai bahan laporan FKPM ke Polsek dan Polres. Dalam pertemuan paling saya ditanya kira-kira perdamaian ini diterima Kapolsek atau tidak. Karena rata-rata perdamaian yang dibuat pada akhirnya minta penangguhan penahan ke Polsek. Masalah yang ditangani FKPM hampir semuanya kasus perkelahian yang pelakunya biasanya sudah ditahan Polsek. Makanya saya bilang, buat saja dulu nanti baru kita ajukan”.

Butir-butir perdamaian disusun oleh anggota FKPM Nagori Senio berdasarkan pertimbangan atas permasalahan yang ada. Pihak yang terlibat perselisihan kemudian membaca butir-butir perdamaian dan dilakukan revisi jika masih diperlukan perubahan-perubahan. Dalam proses penyelesaian pemecahan masalah pihak-pihak yang berselisih selalu mendapat penekanan dari anggota FKPM bahwa masalah akan ditangani oleh Polsek apabila tidak ada kesepakatan.